



MAJALAH

Parlementaria

Suram Pendidikan Jelang Indonesia Emas



EDISI 233
TH. 2024





Biro Pemberitaan Parlemen

Parlementaria

PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL PENGARAH

Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

M. Ibnurkhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)

Agus Budi Leksono, S.A.P (Kasubag Analisis Media)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR

Agung Hidayat, S.I.P, Ridwan Budiman, S.I.P, Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Fadlun Bariyah, Prima Danutirto, A.Md,

Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Devi Inandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrullil, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rim-bani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firda Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiarti, Arief Rachman, R. Kresno PD, Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen, Moh. Farhan NF

ANALIS MEDIA

Supian, S.E, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widoyatosi, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Darnar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E.

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Zulfikar, S.A.B.

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

LAPORAN UTAMA

Suram Pendidikan Jelang Indonesia Emas

4



4

PROLOG Suram Pendidikan Jelang Indonesia Emas

6

LAPORAN UTAMA

- Kenaikan UKT Batal, Selesaikan Masalah Pendidikan Tinggi?
- Kurikulum Merdeka Belum Layak Jadi Kurikulum Nasional
- Kurikulum Merdeka Butuh Pengawasan
- Apa Kabar Nasib Pendidikan Indonesia

16

SUMBANG SARAN Inovasi dan Tantangan Evaluasi Mendalam Pendidikan Nasional

18

PENGAWASAN Candu Impor BBM

20

ANGGARAN Bertahan dari Penurunan Dolar

22

LEGISLASI Revisi UU Pemilu : Menginventarisir Masalah Pemilu

24

FOTO BERITA

28

LENSA PARLE Menoreh Kisah Paras Sekolah

30

PROFIL Mulyadi : Sang Pialang di Panggung Politik

34

KUNKER



PENGAWASAN

Candu Impor BBM

18

ANGGARAN

Bertahan Dari Penurunan Dolar

20

LEGISLASI

Revisi UU Pemilu: Menginventarisir Masalah Pemilu

22

PIMPINAN

- 56 **SOROTAN**
Visa Khusus Untuk Berhaji
- 58 **LIPUTAN KHUSUS**
Nusa Dua *Communique* Komitmen Parlemen Dunia Untuk Air
- 60 **DAPIL**
- 70 **TOKOH**
Ekho Kurniawan Sahabat Alam Sang Pengelola Lingkungan
- 72 **PERNIK**
Teknologi *Smart Packaging*: Solusi Rasa Aman Pada Makanan Siap Saji
- 74 **KIAT SEHAT**
Mengenal Lebih Dekat Radang Pada Usus Buntu
- 76 **WISATA**
Kisah Gedung Pos Tua di Tangan Anak Muda
- 78 **HOBI**
Fadli Zon: Prangko Penanda Zaman
- 79 **POJOK PARLE**
Hidup Mahasiswa!

SCAN QR
UNTUK BERITA TERKINI
SEPUTAR DPR RI



Ikuti Akun Media Sosial DPR RI
Follow, Like & Subscribe

medsos@dpr.go.id

DPR RI DPR RI @dpr_ri @dpr_ri @dpr_ri

www.dpr.go.id

Suram Pendidikan Jelang Indonesia Emas 2045

Dalam dokumen Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045, Indonesia Emas 2045 adalah sebuah visi dan target pembangunan jangka panjang yang dicanangkan pemerintah Indonesia. Tujuannya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju yang berdaulat, mandiri, dan berkeadilan pada tahun 2045 yang saat itu Indonesia akan merayakan 100 tahun kemerdekaannya.



VISI ini menekankan pada berbagai aspek pembangunan, termasuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,

peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan infrastruktur, inovasi teknologi, pembangunan sumber daya manusia, keberlanjutan lingkungan, serta penguatan kedaulatan dan kemandirian nasional.

Agenda Indonesia Emas 2045 diharapkan menjadi panduan bagi kebijakan dan program pembangunan jangka panjang pemerintah Indonesia serta menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk berkontribusi dalam mewujudkan visi tersebut.

Sejalan dengan itu, Indonesia Emas dan pendidikan memiliki hubungan yang erat karena pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Indonesia menjadi kunci untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten, inovatif, dan

berdaya saing tinggi.

Dalam konteks Indonesia Emas 2045, pendidikan diarahkan untuk menciptakan individu yang mampu menghadapi tantangan global, memanfaatkan teknologi dengan bijak, serta memiliki keterampilan yang relevan dengan tuntutan pasar kerja masa depan. Hal ini mencakup peningkatan akses terhadap pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dari tingkat dasar hingga tingkat tinggi, pemberdayaan guru dan tenaga pendidik, pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan zaman, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran.

Dengan memprioritaskan pendidikan yang berkualitas, tentu bertujuan menghasilkan lulusan yang mampu berkontribusi secara

maksimal dalam pembangunan bangsa dan menciptakan masyarakat yang cerdas, kreatif, dan berdaya saing di tingkat global. Oleh karena itu, investasi pendidikan merupakan bagian penting dari strategi mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Sayangnya, visi Indonesia Emas 2045 tersebut tidak selalu kongruen dengan tiap tahapan implementasi



untuk mewujudkannya. Padahal, waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkannya tidaklah cukup banyak, hanya sebelas tahun. Sehingga, salah satu cara untuk akselerasi capaian pendidikan tersebut adalah melalui perbaikan tata kelola pendidikan, termasuk di pendidikan tinggi negeri. Tata kelola pendidikan tersebut mulai dari pembenahan kurikulum, kesejahteraan dosen, hingga pembiayaan atau penganggaran, baik yang berasal dari pemerintah maupun peserta didik itu sendiri.

Padahal, pendidikan merupakan amanat konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Hal itu tertuang dalam Pasal 31 Ayat (5), UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan manusia.

Bahkan, dalam Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 jelas tertera bahwa alokasi anggaran pendidikan 20 persen berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Daerah (APBN/APBD). Bercermin dari amanat ini, ekosistem pendidikan yang berkeadilan seharusnya menjadi bagian dari prioritas pemerintah demi menuju masa depan bangsa yang cerah.

Dari sisi kesejahteraan guru dan dosen, Parlemenaria menelusuri bahwa ekosistem pendidikan yang baik tidak akan tercipta tanpa dukungan SDM yang mumpuni, baik secara kuantitas maupun kualitas. Sebab itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan program perekrutan 1 juta guru honorer menjadi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Akan tetapi, program tersebut diprediksi tidak mencapai target yang dijanjikan. Ketua Komisi X DPR

RI Syaiful Huda menyampaikan salah satu pemicu gagal tercapainya target adalah tidak adanya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Tanpa upaya sinkronisasi ini, menurutnya, akan sulit diimplementasikan karena kerap terjadi miskomunikasi.

Terbukti, terhitung sampai batas waktu pengajuan formasi pada 31 Januari 2024, pemerintah daerah tidak kunjung melengkapi kuota pengangkatan guru honorer yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebanyak 419.146 guru. Dengan demikian, hampir bisa dipastikan kondisi ini akan membuat target penuntasan pengangkatan guru honorer menjadi PPPK tahun 2024 meleset.

Dari sisi anggaran, khususnya, untuk pendidikan tinggi, bahkan lebih bermasalah, khususnya pascaterbitnya Permendikbud Nomor 2 tahun 2024. Permendikbud tersebut mengatur tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemendikbudristek. Permendikbud tersebut menjadi polemik, selain karena kerap memunculkan multiinterpretasi oleh kalangan pendidikan tinggi, juga karena menjadi acuan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang tinggi di kampus-kampus negeri.

Mendikbudristek Nadiem Makarim mengungkapkan bahwa anggaran pendidikan yang diterima dan dikelola oleh kementerian yang dipimpinnya itu pada tahun 2024 hanya 15 persen dari keseluruhan anggaran pendidikan yang ada, atau sekitar Rp98,9 triliun dari total anggaran pendidikan sebesar Rp665 triliun.

Sementara sebanyak 52 persennya atau sekitar Rp346,5 triliun digunakan untuk anggaran pendidikan (transfer daerah), dan 33 persen atau sekitar Rp219,4 triliun tersebar di Kementerian Agama, kementerian/lembaga, dan

Kementerian Keuangan sebagai pengelola anggaran pembiayaan pendidikan, serta anggaran pendidikan non K/L.

Terakhir, dari sisi kurikulum, DPR menilai bahwa Kurikulum Merdeka lebih unggul dibandingkan kurikulum sebelumnya hanyalah sebatas klaim. Kurikulum sebelumnya, yaitu Kurikulum 2013, dan Kurikulum 2013 yang disempurnakan (2015). Kendati Kurikulum Merdeka merupakan modifikasi dari kurikulum darurat yang diluncurkan selama pandemi Covid-19 pada tahun ajaran 2020/2021. Sehingga, kurikulum merdeka belum teruji secara akademis menjadi solusi atas hilangnya pembelajaran (learning loss) selama pandemi Covid-19.

Di sisi lain, ada tantangan yang harus diatasi dari Kurikulum Merdeka, terutama dalam memberikan akses pendidikan yang merata. Meskipun pemerintah berencana meluncurkan Kurikulum Merdeka Belajar sebagai kurikulum nasional, berbagai catatan terkait dengan Kurikulum Merdeka Belajar harus menjadi perhatian serius.

Dengan beranjak dari tiap evaluasi, hambatan, dan tantangan Kurikulum Merdeka di atas, maka penting pula untuk terus didorong dilakukan perbaikan. Sebab, generasi emas 2045 memiliki kaitan erat dalam upaya menciptakan pendidikan yang berkualitas dan relevan untuk mendukung visi Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045.

Sebab, generasi emas 2045 merujuk pada visi Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2045, harus memiliki sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Pendidikan menjadi fondasi utama dalam mencapai visi ini, dan Kurikulum Merdeka dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan lebih banyak kebebasan kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dan efektif.  **bia/mh**

Kenaikan UKT Batal, Selesaikan Masalah Pendidikan Tinggi?

Gelombang protes mahasiswa dan masyarakat terkait kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia semakin meningkat. Tidak tanggung-tanggung, kenaikan UKT dan IPI (Iuran Pembangunan Institusi) mencapai lima kali lipat.



KENAIKAN yang tinggi itu sempat diusulkan di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Universitas Negeri Riau,

dan USU (universitas Sumatera Utara). Atas desakan Komisi X DPR RI kenaikan UKT pun dibatalkan pemerintah. Namun, permasalahan tentu tidak berhenti sampai di situ. Lewat Panja Pembiayaan Pendidikan Tinggi, Komisi X DPR mencoba mengurai akar permasalahan kenaikan UKT.

Pertanyaan besar pun muncul, ke mana anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN itu? Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi dalam rapat kerja Komisi X dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim di DPR, Selasa (21/5) lalu, mempertanyakan, penggunaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Hal itu menyusul gelombang protes dari mahasiswa dan masyarakat terkait kenaikan UKT di berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia.

Dijelaskan politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini bahwa dalam kurun waktu dua minggu terakhir sangat ramai protes kenaikan UKT, BKT (biaya kuliah tunggal), maupun

IPI (iuran pembangunan institusi). Bahkan, di DPR sendiri telah menerima banyak audiensi dari beberapa BEM (badan eksekutif mahasiswa), mahasiswa, perguruan tinggi. Pihaknya menilai, isu tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa solusi konkret.

Karena banyak aduan, Komisi X pun mengundang Mendikbudristek ke DPR untuk memberikan penjelasan soal ini. "Ada asumsi di luar (masyarakat-red) bahwa anggaran pendidikan itu 20% dari APBN. Seandainya APBN kita di angka mungkin Rp3.300 triliun, artinya kalau 20%-nya itu mestinya di angka Rp665 triliun. Itulah yang selalu ditanya, ke mana saja anggaran pendidikan ini," ujar Dede.

Mendikbudristek Nadiem Makarim mengungkapkan bahwa anggaran pendidikan yang diterima dan dikelola oleh kementerian yang dipimpinya itu pada tahun 2024 hanya 15 persen dari keseluruhan anggaran pendidikan yang ada, atau sekitar Rp98,9 triliun dari total anggaran pendidikan sebesar Rp665 triliun.

Sementara sebanyak 52 persennya atau sekitar Rp346,5 triliun digunakan untuk anggaran pendidikan (transfer daerah), dan 33 persen atau sekitar Rp219,4 triliun tersebar di Kementerian Agama, kementerian/lembaga, dan Kementerian Keuangan sebagai



Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, saat memimpin Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Mendikbudristek, Nadiem Makarim di ruang rapat Komisi X.



FOTO: DEP/VEL

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda saat memimpin Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Mendikbudristek, Nadiem Makarim.

pengelola anggaran pembiayaan pendidikan, serta anggaran pendidikan non K/L.

Dalam kesempatan itu, Mendikbudristek juga mengungkapkan bahwa sesuai PP No.17/2017, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (MenPPN) dan Menteri Keuangan merupakan kementerian yang memiliki kewenangan dalam proses perencanaan dan penganggaran. Sementara Mendikbudristek tidak memiliki peran dalam pengambilan keputusan alokasi anggaran pendidikan di luar pengajuan anggaran Kemendikbudristek.

Meski kemudian pada tahun 2022, Kemdikbudristek berhasil menginisiasi PP No.48/2008 jo. PP No.18/2022 tentang Pendanaan Pendidikan yang mengatur bahwa Mendikbudristek, Menkeu, dan MenPPN secara bersama-sama menyetujui pengalokasian anggaran pendidikan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Namun, sampai hari ini belum dijalankan, karena belum ada perubahan dalam PP No.17/2017.

Sedangkan anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp77 triliun serta anggaran pendidikan pada belanja non kementerian/lembaga sebesar Rp47,3 triliun sepenuhnya merupakan kewenangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Termasuk di dalamnya penambahan dana pokok LPDP (lembaga pengelola dana pendidikan) yang juga berada di bawah pengelolaan Kemenkeu. Pada tahun ini, dianggarkan penambahan dana abadi pendidikan (yang dikelola LPDP) sebesar Rp25 triliun, termasuk untuk dana abadi pesantren.

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menanggapi otoritas Kemendikbudristek yang memandang bahwa kenaikan UKT wajar, karena kebutuhan pada pendidikan tinggi merupakan kebutuhan tersier, bukan kebutuhan utama. Menurut Huda, pandangan itu tidak bijak. Walaupun jadi kebutuhan tersier, ternyata angka partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia masih rendah.

"Bahkan, jika kita melihat data BPS (badan pusat statistic) tahun 2023 kemarin, terlihat angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di Indonesia masih berada di angka 31,45 persen. Jumlah ini tertinggal dari negara tetangga seperti Thailand yang sudah mencapai 49 persen, Singapura bahkan sampai 91 persen, dan Malaysia yang memiliki angka partisipasi pendidikan tinggi sekitar 43 persen," ungkap Huda.

Politisi dari Fraksi PKB ini menilai, rendahnya angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di Indonesia salah satunya terkait permasalahan biaya. Tidak sedikit masyarakat yang sebenarnya ingin menyekolahkan anaknya di bangku kuliah, namun terkendala ketiadaan biaya. Oleh karenanya negaralah yang mengambil alih tanggung jawab tersebut lewat berbagai beasiswa dan kemudahan lainnya, termasuk UKT yang terjangkau. **ayu/mh**



FOTO: DEP/VEL

Mendikbudristek Nadiem Makarim saat Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI.

Kurikulum Merdeka Belum Layak Jadi Kurikulum Nasional

Bicara soal pendidikan, berarti bicara tentang pengajaran. Berbicara tentang pengajaran, berarti bicara tentang kurikulum apa yang ingin *di-deliver* kepada peserta didik dari pelaku pendidikan. Dewasa ini, pemerintah melalui Kemendikbudristek, telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.



REGULASI ini menetapkan standar proses pendidikan yang harus diikuti dalam pengembangan dan implementasi

kurikulum, termasuk pengaturan tentang Kurikulum Merdeka. Adapun Permendikbud tersebut merupakan turunan dari UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang memberikan landasan bagi pembentukan kurikulum pendidikan nasional, termasuk pengaturan tentang struktur, proses, dan isi kurikulum.

Dalam catatan *Parlementaria*, Kurikulum Merdeka ini memiliki perbedaan dengan kurikulum sebelumnya, seperti Kurikulum 2013, antara lain, pertama, Fleksibilitas dan Otonomi Sekolah. Kurikulum Merdeka memberikan lebih banyak kebebasan kepada sekolah dalam merancang dan mengadaptasi kurikulum mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Ini berbeda dengan kurikulum sebelumnya yang lebih terpusat dan terstandarisasi.

Kedua, Kurikulum Merdeka memiliki penekanan pada keterampilan Hhdup. Kurikulum Merdeka menekankan



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih.

pengembangan keterampilan hidup (*life skills*) yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan dunia kerja, seperti keterampilan berpikir kritis, kreatif, berkomunikasi, dan kolaborasi.

Ketiga, Kurikulum Merdeka memiliki pendekatan pembelajaran

berbasis proyek dan kontekstual. Siswa diajak belajar melalui pengalaman nyata dan aplikasi dalam konteks kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, implementasi dari Kurikulum Merdeka ini bukan tanpa tantangan. Setidaknya, terdapat lima tantangan



Beberapa pakar menilai, Kurikulum Merdeka belum layak dijadikan kurikulum nasional, karena belum dilengkapi dengan naskah akademik yang memuat filosofi pendidikan dan kerangka konseptual yang menjadi dasar pemikiran Kurikulum Merdeka

Abdul Fikri Faqih.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI

yang dihadapi selama ini. Beberapa tantangan tersebut di antaranya mulai dari kesiapan sumber daya.

Sekolah perlu memiliki sumber daya yang memadai baik dari segi guru yang terlatih, buku teks yang relevan, infrastruktur pendidikan, dan dukungan administratif untuk menerapkan kurikulum yang disesuaikan. Selain itu, diperlukan juga pengembangan kurikulum yang berkualitas. Kurikulum tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal yang membutuhkan waktu, sumber daya, dan keahlian memadai. Kurikulum yang berkualitas harus mencakup aspek keterampilan, pengetahuan, dan nilai yang relevan dengan perkembangan siswa.

Tak cukup sampai di situ, Kurikulum Merdeka juga memerlukan sistem evaluasi yang baik untuk memastikan bahwa kurikulum yang dikembangkan secara independen oleh sekolah sesuai dengan standar pendidikan nasional dan mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan.

Kurikulum Merdeka juga penting melibatkan semua stakeholder, termasuk guru, orangtua, siswa, dan komunitas lokal dalam proses pengembangan dan implementasi

Kurikulum Merdeka. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa kurikulum mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat.

Terakhir, Kurikulum Merdeka membutuhkan keterkaitan dengan dunia kerja dan perguruan tinggi. Kurikulum yang fleksibel dan disesuaikan secara lokal juga perlu memperhitungkan kebutuhan dunia kerja dan persyaratan masuk perguruan tinggi agar lulusan dapat siap bersaing dan berkontribusi dalam masyarakat.

Menanggapi polemik di atas, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai bahwa Kurikulum Merdeka yang dikatakan unggul daripada kurikulum sebelumnya hanya sebatas klaim. Kurikulum sebelumnya, yaitu Kurikulum 2013, dan Kurikulum 2013 yang disempurnakan (2015). Kendati Kurikulum Merdeka merupakan modifikasi dari kurikulum darurat yang diluncurkan selama pandemi Covid-19 pada tahun ajaran 2020/2021.

"Beberapa pakar menilai, Kurikulum Merdeka belum layak dijadikan kurikulum nasional, karena belum dilengkapi dengan

naskah akademik yang memuat filosofi Pendidikan dan kerangka konseptual yang menjadi dasar pemikiran kurikulum merdeka," imbuh politisi Fraksi PKS ini.

Sehingga, kurikulum merdeka belum teruji secara akademis menjadi solusi atas hilangnya pembelajaran (learning loss) selama pandemi Covid-19. "Lalu perlu dievaluasi apakah daerah secara merata mampu dan siap melaksanakan kurikulum baru ini?" tanyanya.

Kendati demikian, Hasil PISA (Programme for International Student Assessment) tahun 2022 diklaim sebagai kesuksesan Kemendikbudristek menerapkan kurikulum darurat selama pandemi Covid-19. Peringkat PISA Indonesia tahun 2022 naik 5 hingga 6 peringkat dibanding hasil PISA 2018 lalu.

"Namun, fakta lain menyebutkan skor PISA Indonesia tahun 2022 di bidang literasi membaca, matematika, dan sains juga menurun dibanding tahun 2018. Jadi, sudut pandang kesuksesan PISA relatif dilihat dari mana," sela Fikri. — rdn/mh

Kurikulum Merdeka Butuh Pengawasan

Kurikulum Merdeka yang digadang-gadang sangat unggul dibanding konsep kurikulum sebelumnya, ternyata masih dinilai belum ideal oleh DPR RI. Setidaknya, Komisi X DPR sering mengeritisi konsep kurikulum terbaru ini.



WAKIL Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi, menyatakan komitmennya untuk melakukan pengawasan

yang ketat terhadap implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. Menurutnya, ada tantangan yang harus diatasi, terutama dalam memberikan akses pendidikan yang merata. Meskipun pemerintah berencana meluncurkan Kurikulum Merdeka Belajar sebagai kurikulum nasional, berbagai catatan terkait dengan Kurikulum Merdeka Belajar harus menjadi perhatian serius.

"Kita akan mengawasi, kita akan mengawal terus. Jangan sampai Kurikulum Merdeka Belajar ini akhirnya meninggalkan mereka yang belum sempat ikut. Saya rasa masih diperlukan perbaikan-perbaikan. Kita tahu pemerintahan ini bersisa delapan bulan. Tentu harus kita kawal dengan baik dan kelanjutannya nanti harus lebih baik lagi," ungkap Dede.

"Saya yakin, tidak semua sekolah memiliki kompetensi atau kemampuan untuk mengikuti perubahan ini secara cepat. Hal ini menjadi alasan utama untuk kita memastikan pengawasan yang intensif

agar tidak ada sekolah yang tertinggal ketika belum siap menjalankan kurikulum merdeka belajar ini," ungkapnya

"Kita harus fokus pada perbaikan agar tidak ada yang tertinggal. Pengawasan yang intensif dan kolaborasi dengan semua pihak akan menjadi kunci keberhasilan implementasi kurikulum ini," ujar politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Lebih lanjut, Dede Yusuf juga menyoroti kendala guru penggerak yang menjalankan Kurikulum Merdeka Belajar, yaitu pendidikan pembelajaran secara online yang mungkin

memakan waktu yang cukup lama sampai 15 hari. Padahal, menurutnya, kewajiban guru itu tetap harus mengajar dan tidak boleh meninggalkan ruang kelas.





“

Generasi emas 2045 merujuk pada visi Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2045 yang harus memiliki sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Pendidikan menjadi fondasi utama dalam mencapai visi ini

Dede Yusuf Macan Effendi,
Wakil Ketua Komisi X DPR RI

“Ini rasanya harus dicari titik temu agar pembelajaran kursus (untuk mengikuti Guru Penggerak) itu enggak diborong 15 hari sekaligus tapi bisa dicicil, mungkin di Sabtu Minggu. Tapi tentu kita harus diskusi lagi dengan Kemendikbudristek,” ujarnya.

Indonesia Emas 2045

Dengan beranjak dari tiap evaluasi, hambatan, dan tantangan Kurikulum Merdeka di atas, maka penting pula untuk terus didorong dilakukan perbaikan. Sebab, generasi emas 2045 memiliki kaitan erat dalam upaya menciptakan pendidikan yang berkualitas dan relevan untuk mendukung visi Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045.

Generasi emas 2045 merujuk pada visi Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2045 yang harus memiliki sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Pendidikan menjadi fondasi utama dalam mencapai visi ini, dan Kurikulum Merdeka dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan lebih banyak kebebasan kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dan efektif.

Di sisi lain, Kurikulum Merdeka menekankan pengembangan keterampilan hidup yang relevan dengan kebutuhan masa depan, seperti keterampilan berpikir kritis, kreatif, berkomunikasi, dan kolaborasi. Generasi emas 2045 membutuhkan generasi yang memiliki keterampilan ini untuk bersaing di era globalisasi dan teknologi yang cepat berubah.

Dengan demikian, Kurikulum Merdeka dan generasi emas 2045 saling terkait dalam upaya menciptakan pendidikan yang berkualitas, relevan, dan inovatif untuk mempersiapkan generasi mendatang Indonesia menjadi unggul dalam berbagai bidang dan mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045. rdn/mh



Apa kabar Nasib Pendidikan Indonesia?

Pendidikan, sebuah harapan yang dihembuskan untuk mengubah nasib bangsa menuju masa depan yang cerah. Namun, realita berkata lain.

Walaupun sudah dibekali dengan alokasi anggaran 20 persen dari APBN, pemerintah dinilai masih karut marut mengurus sektor pendidikan, termasuk kepastian nasib SDM pendidikan.



PENDIDIKAN adalah dongkrak yang bisa meningkatkan kualitas hidup individu sekaligus masyarakat. Tidak bisa

dipungkiri, ada ekspektasi bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan yang dilalui, maka akan semakin baik taraf kehidupan yang dimiliki. Negara pun mengamini dengan menjamin lewat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Pasal 31 Ayat 5 dalam UUD 1945 disebutkan pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan manusia. Bercermin dari amanat ini, ekosistem pendidikan yang berkeadilan seharusnya menjadi bagian dari prioritas pemerintah demi menuju masa depan bangsa yang cerah.

Akan tetapi, ekosistem pendidikan yang baik tidak akan tercipta tanpa dukungan SDM yang mumpuni, baik secara kuantitas maupun kualitas. Sebab itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan program perekrutan 1 juta guru honorer menjadi guru Pegawai



FOTO: DEP/VEL

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda.

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Akan tetapi, program tersebut diprediksi tidak mencapai target yang dijanjikan. Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyampaikan salah satu pemicu gagal tercapainya target adalah tidak adanya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Tanpa upaya sinkronisasi ini, menurutnya, akan sulit diimplementasikan karena kerap terjadi miskomunikasi.

Terbukti, terhitung sampai batas waktu pengajuan formasi pada 31 Januari 2024, pemerintah daerah tidak kunjung melengkapi kuota pengangkatan guru honorer yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebanyak 419.146 guru. Dengan demikian, hampir bisa dipastikan kondisi ini akan membuat target penuntasan pengangkatan guru honorer menjadi PPPK tahun 2024 meleset.

Selain itu, ungkapnya, ketidaksesuaian jumlah formasi yang diajukan pemerintah daerah dengan kuota pemerintah pusat, ketakutan pemerintah daerah terhadap beban gaji guru honorer yang diangkat PPPK, hingga masalah distribusi atau penempatan guru yang diangkat PPPK menjadi deretan isu yang berkaitan dengan program perekrutan 1 juta guru honorer menjadi guru PPPK.

"Masalah utama penuntasan pengangkatan satu juta guru honorer menjadi PPPK terus berulang dari tahun ke tahun. Ironisnya tidak ada terobosan dari Kemendikbudristek untuk menuntaskannya," ungkap Huda.

Terkait anggaran, Huda menyebutkan salah satu kendala berat dalam penuntasan pengangkatan guru honorer ini adalah ketakutan pemerintah daerah (pemda) atas beban anggaran yang harus ditanggung. Ada indikasi Dana Alokasi Khusus (DAU) dari pemerintah pusat yang diperuntukkan bagi guru PPPK dalam APBD jumlahnya tidak bertambah.

Persoalan anggaran ini, lanjutnya, juga memengaruhi masalah penempatan guru honorer yang telah lolos passing grade (P1) dalam seleksi PPPK. Mereka tak kunjung mendapatkan formasi penempatan dari masing-masing pemda sampai terkatung-katung lebih dari dua tahun terakhir.

"Nah, di masalah formasi penempatan ini agak aneh. Harusnya karena sudah lulus di level seleksi, DAU untuk mereka sudah dialokasikan. Artinya, tidak ada masalah bagi pemda untuk menempatkan para guru PPPK di sekolah yang membutuhkan. Pemerintah harus lebih tegas kepada pemda jika menggunakan DAU gaji PPPK yang sudah di-earmarking untuk keperluan lain," katanya.

Oleh karena itu, dirinya menilai harus ada langkah terobosan



FOTO: ENO/VEL

Ketua DPR RI Puan Maharani.

untuk menuntaskan masalah pengangkatan guru honorer menjadi PPPK. Baginya, Kemendikbudristek harus bisa mengambil inisiatif yang tangkas karena program ini melibatkan lintas kementerian/ lembaga (K/L).

"Kami berharap program pengangkatan satu juta guru honorer ini menjadi legacy dari Mas Menteri Nadiem Makarim. Oleh karena itu sudah selayaknya beliau lebih aktif untuk mengambil langkah terobosan agar semua persoalan rekrutmen maupun penempatan guru PPPK bisa terselesaikan tahun ini," tandas Huda.

Setali tiga uang, Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan bahwa terciptanya generasi unggul tidak terlepas dari peran guru sebagai tenaga pendidik. Untuk itu, kesejahteraan guru juga harus menjadi prioritas.

"Pemerintah masih memiliki PR dalam hal pengangkatan guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian

kerja (PPPK) yang pada tahun 2024 ditargetkan mencapai 1 juta. DPR menantikan komitmen pemerintah mengenai peningkatan kesejahteraan guru sebagai pahlawan pencetak generasi unggul bangsa," tutur Puan.

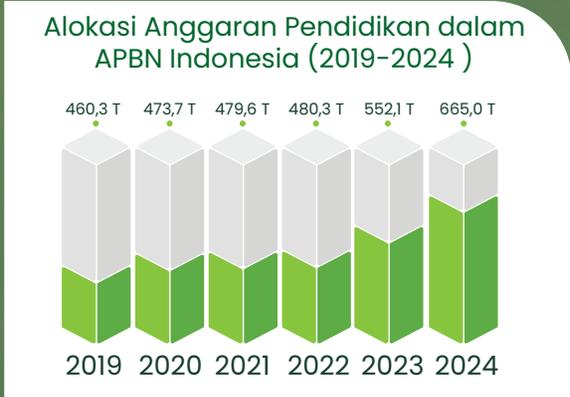
Pada momen Hari Pendidikan Nasional, dirinya mendorong semua guru agar berkomitmen mengembangkan keterampilan. Tak hanya dari sisi pengajaran, akan tapi juga kualitas komunikasi dengan para siswa.

Di sisi lain, ia juga menyadari banyaknya tantangan dalam dunia pendidikan di Indonesia memerlukan kerja sama semua elemen bangsa. DPR, imbuhnya, berkomitmen mengawal program-program pendidikan demi pembangunan bangsa.

Sesuai dengan tema Hardiknas 2024 yakni 'Bergerak Bersama, Lanjutkan Merdeka Belajar', Puan mengajak semua kalangan termasuk masyarakat bergandeng tangan mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia. **um/mh**

Data Pendidikan 2024

Dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, inovatif, berintegritas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045, pemerintah akan mempersiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp660,8 triliun atau 20 persen pada APBN 2024.



Anggaran pendidikan melalui TKD dialokasikan sebesar Rp 346,5 triliun (52,1 persen), antara lain untuk komponen dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, atau dana otonomi khusus) untuk bidang pendidikan. Jumlah tersebut meningkat 15,3 persen dibandingkan dengan outlook tahun sebelumnya. Hal itu terutama disebabkan adanya kenaikan gaji aparatur sipil negara.

Selanjutnya, anggaran pendidikan bersumber dari pembiayaan anggaran dalam pos pembiayaan investasi, yaitu melalui alokasi Dana Abadi di Bidang Pendidikan yang direncanakan sebesar Rp 25 triliun.

Dana Abadi di Bidang Pendidikan ini terdiri atas Dana Abadi Pendidikan

(termasuk di dalamnya ada Dana Abadi Pesantren) sebesar Rp 15 triliun, Dana Abadi Penelitian sebesar Rp 4 triliun, Dana Abadi Kebudayaan sebesar Rp 2 triliun, dan Dana Abadi Perguruan Tinggi sebesar Rp 4 triliun.

Dari tiga macam aliran anggaran tersebut, tidak terlihat secara spesifik berapa porsi yang khusus diperuntukkan bagi institusi pendidikan tinggi. Arah kebijakan anggaran pendidikan tahun 2024 memang sangat umum, mencakup banyak aspek.

Mulai dari peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar, bantuan pendidikan berupa beasiswa, penguatan kualitas dan ketersediaan layanan PAUD, peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidikan, hingga penguatan pendidikan vokasi, dan sebagainya. Cakupannya sangat luas.

Belanja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, riset dan teknologi



Alokasi Program Pendidikan Tinggi di Kemendikbudristek

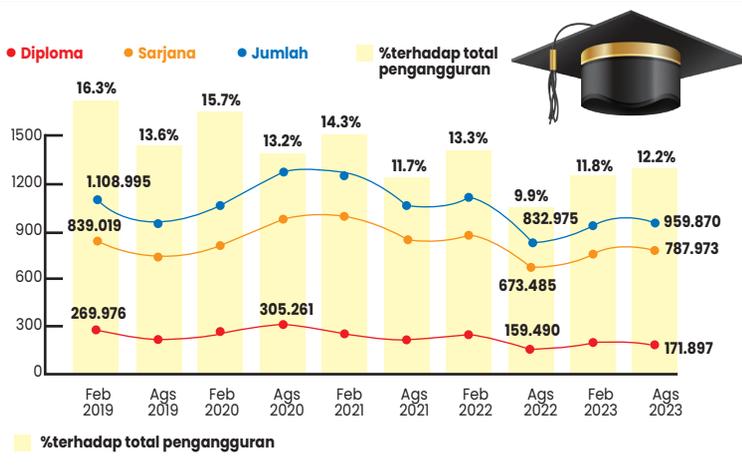


Kondisi Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Feb 2022	Feb 2023	Feb 2024
SD Kebawah	3.09%	3.02%	2.38%
SMP	5.61%	5.41%	4.28%
SMA	8.35%	7.69%	6.73%
SMK	10.38%	9.6%	8.62%
Diploma I/II/III	6.09%	5.91%	4.87%
Diploma IV, S1, S2, S3	6.17%	5.52%	5.63%

Pengangguran Kaum Terdidik



Perubahan Tarif UKT Program Sarjana

Univ. Indonesia dan Univ. Sumatera Utara



Lini Masa Penyelenggaraan Perguruan Tinggi

1961
UU nomor 22 Tahun 1961 Tentang Perguruan Tinggi
► Penyelenggaraan perguruan tinggi dilakukan oleh pemerintah dan badan hukum swasta

1982
Surat Keputusan No. 15/12/Kep/Dir/UKK
► Diperkenalkan pinjaman pendidikan bagi mahasiswa dalam bentuk Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI)

1999
PP Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT-BHMN)
► Memulai sistem otonomi Perguruan Tinggi Negeri yang disebut Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT-BHMN)

1990
PP Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Tinggi
► Pembiayaan perguruan tinggi dapat diperoleh dari sumber pemerintah, masyarakat, dan pihak luar negeri

2003
UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)
► Menegaskan mengenai hak otonom dan kemandirian PTN.

2009
UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP)
► Tujuannya menolong Kemandirian PTN

2012
UU Nomor 12 Tahun 2012 yang mengatur kewenangan PTN dengan status Badan Hukum atau PTN-BH
► Kembali ke bentuk PTN dengan hak Otonom (PTN-BH)

2010
PP Nomor 66/2010
► Mengembalikan status PT-BHMN menjadi perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah

2013
Permendikbud Nomor 55 Tahun 2013
► Ketentuan Sistem Uang Kuliah Tunggal (KUT)

2014
Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014
► Menambahkan beberapa ketentuan mengenai BKT dan UKT bagi PTN dengan status Badan Hukum (PTN-BH)

2015
Permen Ristekdikti Nomor 22 Tahun 2015
► Menegaskan terkait UKT yang diberikan kepada penerima bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa miskin dan berprestasi (bidikmisi)

2016-2017
Permen Ristekdikti Nomor 39 Tahun 2016 dan 2017
► Menetapkan tarif minimum UKT kelompok I sebesar Rp. 500.000, dan UKT kelompok II sebesar Rp. 501.000 hingga Rp. 1 Juta

2020
Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020
► Mencakup kebijakan penyesuaian UKT, kebijakan bantuan pendemi bagi mahasiswa, serta kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) afirmasi dan BOS kinerja

2024
Permen Ristekdikti Nomor 2 Tahun 2024
► Ketetapan baru mengenai kenaikan UKT bagi PTN dengan status Badan Hukum (PTN-BH)
► Tarif UKT wajib ditetapkan dan digolongkan minimal menjadi dua kelompok:
Kelompok I Rp. 500.000
Kelompok II Rp. 1.000.000



Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) 2024 mulai disalurkan pada Januari ke satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Penyaluran ini lebih cepat dibanding tahun-tahun sebelumnya yang umumnya baru terealisasi pada Februari. Total anggaran 57,55 Triliun.



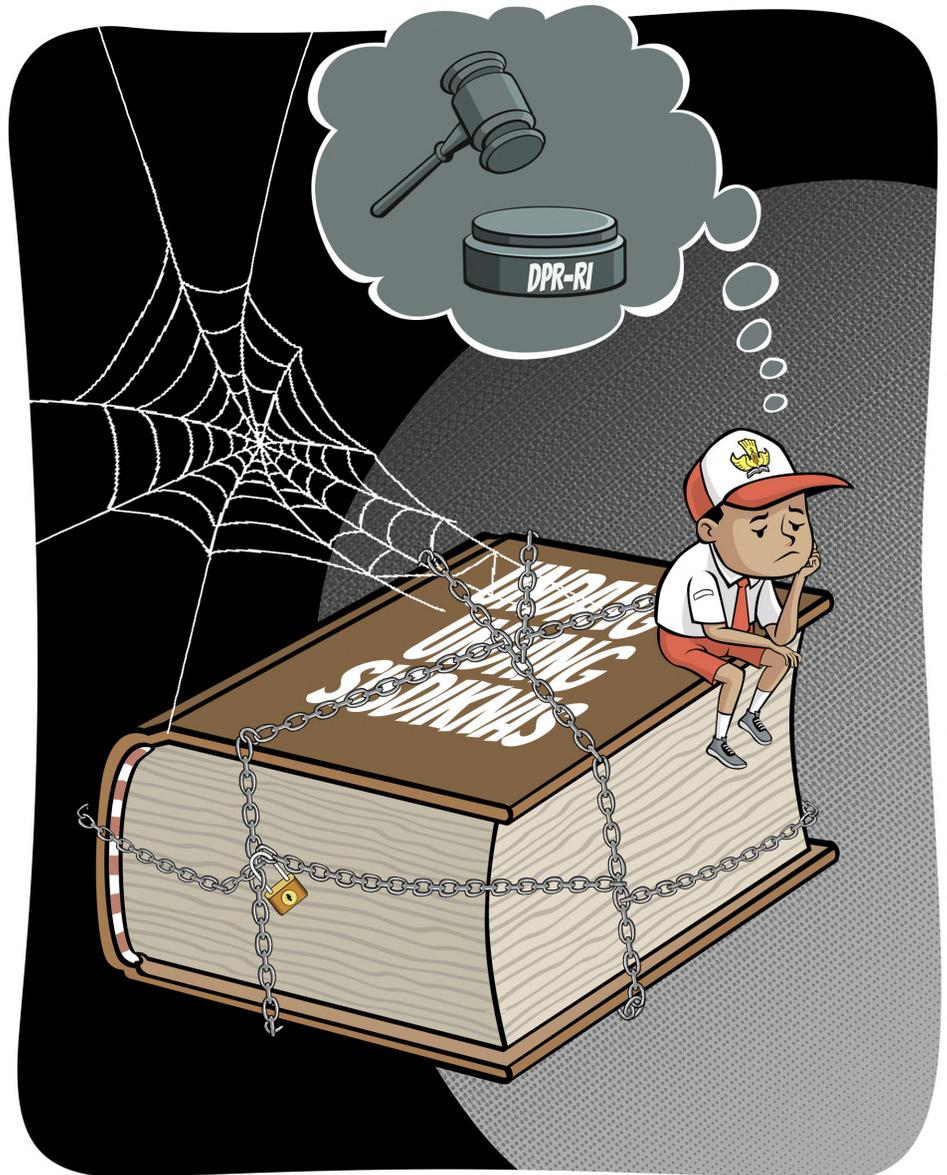
Oleh:
Ina Liem
CEO dan Founder of Jurusanku

Pertama, pendidikan harus menyiapkan generasi muda agar siap memasuki dunia kerja yang serba dinamis. Kedua, di era perubahan yang serba cepat dan kompleks, pendidikan dituntut mencetak individu-individu yang tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga semangat belajar sepanjang hayat. Dan yang tak kalah penting, pendidikan harus mampu membentuk warga negara yang bertanggung jawab dan berpartisipasi aktif di masyarakat.

Pertama-tama, mari kita tinjau apakah generasi muda kita siap memasuki dunia kerja. Banyak pimpinan HRD perusahaan mengeluh kesulitan mendapatkan karyawan yang dibutuhkan. Umumnya, mereka mencari karyawan dengan problem solving skill kuat. Namun, skor PISA menunjukkan kemampuan berpikir siswa kita masih rendah, bahkan selama hampir 20 tahun nyaris tak berubah. Ini mengisyaratkan perlunya transformasi pendidikan yang tak hanya meliputi praktik-praktiknya,

Inovasi dan Tantangan: Evaluasi Mendalam Pendidikan Nasional

Pengamat pendidikan terkemuka, Tony Wagner, menyebut tiga tujuan utama pendidikan yang sekaligus menjadi poin untuk dievaluasi.



tetapi juga dalam pola pikir para praktisi utamanya.

Konsep Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang digulirkan Kemendikbudristek berusaha meraih tujuan pertama ini. Sekedar contoh, Program Praktisi Mengajar di universitas berangkat dari pemahaman bahwa inovasi terbaik sering kali muncul dari kolaborasi radikal antar berbagai disiplin ilmu dan antara akademisi dan praktisi. Cara ini diyakini dapat melahirkan lulusan yang inovatif dan siap menghadapi realita dunia kerja.

Pergeseran ke arah pendidikan yang lebih progresif juga tercermin dari keputusan untuk memberi keleluasaan sekolah menentukan sendiri beban belajar siswanya. Menghapus ujian nasional (UN) adalah langkah berani untuk meninggalkan model 'one size fits all'. Model lama ini memang sudah ditinggalkan banyak negara karena tidak mencerminkan realita keberagaman siswa di berbagai daerah. Bahkan, langkah ini sejalan dengan kebutuhan pendekatan yang lebih fleksibel dan inklusif dalam mengevaluasi kemampuan siswa. Meskipun banyak tentangan, pembelajaran yang lebih berorientasi pada kemampuan problem solving ini perlu diteruskan dan dikembangkan.

Selanjutnya, evaluasi terhadap pendidikan juga harus mengukur kemampuan generasi muda sebagai pembelajar sepanjang hayat. Alih-alih membanjiri mereka dengan informasi, Kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran berbasis proyek untuk membangkitkan rasa ingin tahu berkelanjutan sehingga proses belajar menjadi bermakna sehingga menyenangkan. Ini paralel dengan dunia kerja yang menuntut orang untuk terus belajar. Untuk itu Program Guru Penggerak dicanangkan demi mencetak pendidik sebagai fasilitator tangguh yang mampu menumbuhkan sikap pembelajar seumur hidup. Meski konsepnya jitu, program



Pergeseran ke arah pendidikan yang lebih progresif juga tercermin dari keputusan untuk memberi keleluasaan sekolah menentukan sendiri beban belajar siswanya.

guru penggerak masih dianggap ancaman bagi kalangan tertentu karena mendisrupsi jenjang karier kependidikan

Terakhir, peran pendidikan dalam membentuk warga negara yang bertanggung jawab juga menjadi fokus evaluasi. Kita melihat masih banyak persoalan yang menghambat upaya tersebut, seperti rendahnya tingkat kepekaan sosial, yang merupakan cikal bakal perilaku koruptif. Masih tingginya tingkat intoleransi juga menunjukkan bahwa tujuan ini masih jauh dari harapan. Profil Pelajar Pancasila dengan aneka program yang digaungkan Kemendikbudristek memang belum kasat mata hasilnya. Mungkin pendekatan yang lebih kuat dalam mengembangkan karakter dan nilai-nilai solidaritas perlu dipertimbangkan, misalnya melalui pembelajaran dengan model militer namun tanpa kekerasan.

Meskipun arah dan model pendidikan nasional kita sudah sejalan dengan tren zaman, pemerintah masih punya banyak PR, utamanya di tataran implementasi. Korupsi dari hulu sampai tingkat sekolah masih jadi batu sandungan. Oleh karenanya, digitalisasi proses administrasi perlu dilanjutkan lebih masif demi transparansi dan akuntabilitas. Aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIP

LAH) hanyalah salah satu aksi nyata menuju transparansi pengelolaan dana BOS. Namun itu belum cukup. Sistem penerimaan siswa dan mahasiswa baru di lembaga pendidikan negeri perlu dibuat makin sederhana dan transparan. Begitu pula berbagai proses administrasi lainnya.

Banyak resistensi akibat pergeseran peran dan kewenangan di kalangan praktisi pendidikan. Ini mungkin mirip dengan reaksi keras dunia transportasi dulu terhadap disrupsi oleh Uber dan Grab. Seperti pada berbagai kasus disrupsi, suara keras umumnya hanya datang dari pelaku model konvensional, dan bukan dari para pengguna akhir (end user) layanan, yakni penumpang yang justru merasa diuntungkan. Perlu sosialisasi yang lebih mengena dan efektif untuk menghadapi penolakan ini.

Dengan kerjasama yang kuat dari semua pihak, kita dapat berharap bahwa pendidikan nasional mampu mencetak generasi masa depan yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan karakter yang dibutuhkan untuk menghadapi dunia yang semakin kompleks dan berubah cepat. Oleh sebab itu diperlukan percepatan, perluasan cakupan perubahan, dan insentif yang proporsional bagi pihak-pihak yang perannya memang dibutuhkan.

Mungkin PR terbesar bagi DPR adalah menguatkan system pendidikan model baru ini lewat pengesahan UU Sisdiknas agar tidak 'digoyang' untuk kembali ke model lama yang sarat dengan inefisiensi dan praktik pembelajaran yang tidak result-oriented. Jangan sampai kita dilempar kembali kepada model lama ketika SCHOOL dipelesetkan menjadi Seven Cruel Hours Of Our Life, yakni ketika belajar itu tidak menyenangkan dan siswa tidak merasa memiliki prosesnya. Taruhan besar kita adalah tercapainya bonus demografi yang jendela kesempatannya semakin menyempit. 🍀

Candu Impor BBM

Negeri ini dikenal dengan sumber daya alamnya yang melimpah. Namun, ironis Indonesia justru kian candu dengan impor bahan bakar minyak (BBM). Produksi minyak di Indonesia hingga saat ini terus menurun, bahkan sejak 56 tahun terakhir.

Kinerja kementerian/ lembaga termasuk BUMN energi pun dikritik atas kondisi ini. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) jadi sasaran empuk kritik Komisi VII DPR RI atas kinerjanya membenahi sektor energi. SKK Migas dinilai berkinerja buruk, hingga Indonesia selalu bergantung pada impor BBM.

Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin salah satunya, yang memberi penilaian negatif atas kerja SKK Migas. Kinerja hulu Migas tidak menunjukkan perkembangan kemajuan dan kecenderungannya terus menurun. Ini yang dinilai ironis



FOTO: OI/VEL

Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin.

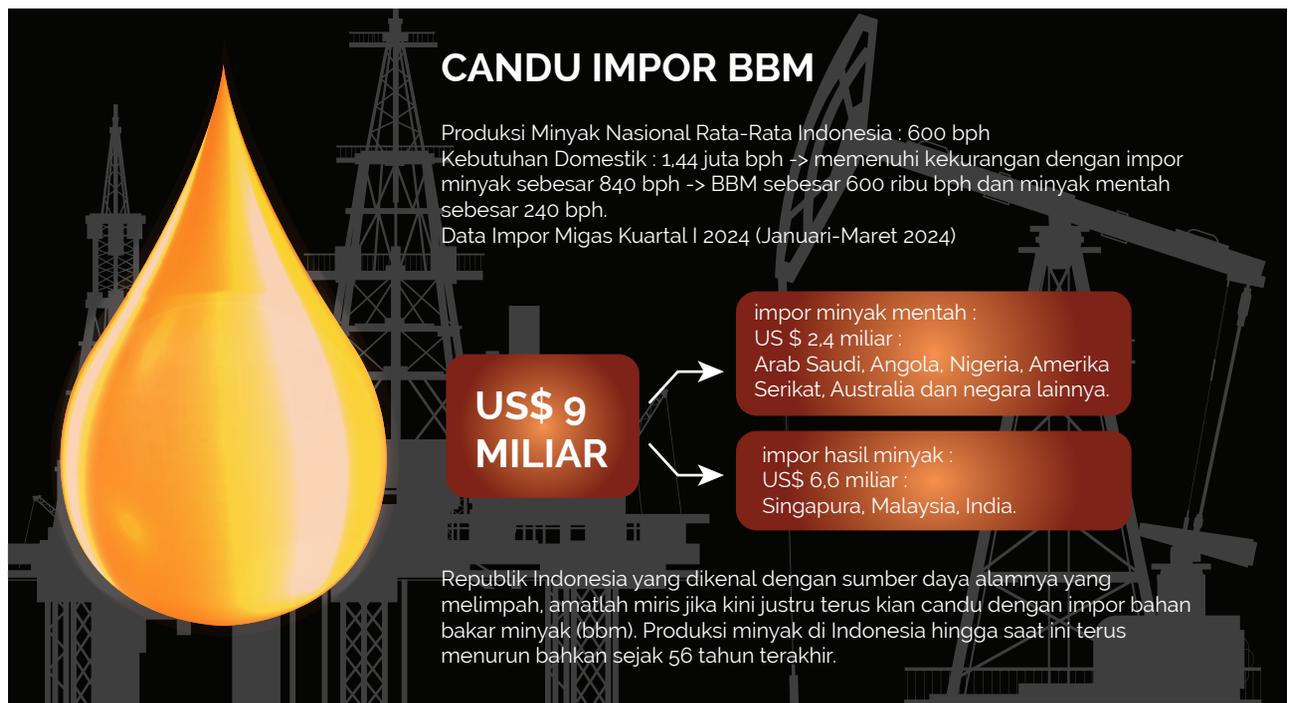




FOTO: OJ/VEL

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto.

dan miris melihat kenyataan produksi BBM di Tanah Air.

"Ya saya kira, akibat kinerja buruk SKK Migas ini membuat Indonesia semakin besar bergantung pada impor BBM dari luar negeri. Kinerja hulu migas yang tidak maksimal, terget lifting tidak tercapai, harga minyak mentah dunia naik, dolar naik, akibatnya bisa krisis energi dan beban APBN kita semakin berat," tegas Mukharudin dalam keterangan persnya yang diterima Parlemen, akhir April lalu.

Dengan kondisi kurangnya produksi minyak nasional ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pun menyebutkan Indonesia berencana menaikkan impor BBM menjadi 850 ribu barel per hari (bph) terutama dari Singapura.

Melihat nilai impor migas nasional yang bukan berkurang, malah semakin meningkat ini, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai, ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan migas nasional. Harus ada upaya melepas ketergantungan impor migas atau paling tidak impor

migas harus bisa dikurangi. Untuk itu, perlu ada terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan minyak nasional.

"Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti. Masak kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal, sumber migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka," kata Mulyanto dalam keterangan tertulisnya.

Menurut data Kementerian ESDM, Pertamina pada tahun 2022 mengimpor BBM dari Singapura dengan persentase sebesar 56,8 persen. Bersama dengan Malaysia, total impor BBM Indonesia dari negeri jiran sebesar 83,6 persen, dengan nilai sebesar USD 16,6 bilion atau sebesar Rp266 triliun (kurs Rp16.000 per USD).

"Jadi, eksportir BBM utama kita bukanlah negara-negara minyak di Timur Tengah tetapi negara

tetangga Singapura. Hampir 57 persen atau sebesar Rp180 triliun kita mengimpor BBM setiap tahun dari Singapura. Ini, kan, jumlah yang sangat besar. Padahal, Singapura hanya negara kota yang tidak punya ladang minyak. Masak tidak malu terus-terusan tergantung impor BBM pada Singapura," urainya.

Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Sementara Indonesia tidak memiliki fasilitas tersebut, sehingga terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan dari negara jiran tersebut.

Format Ulang Tata Kelola Niaga Migas

Menyusul ketergantungan dengan negara tetangga ini, Mulyanto juga mendesak pemerintah baru yang akan datang menata ulang format tata kelola dan tata niaga migas agar Indonesia dapat menjaga kecukupan pasokan energi nasional. "Bila tidak, kondisinya bisa mengkhawatirkan. Ketergantungan kita pada impor minyak dari negeri jiran akan semakin membengkak. Semakin hari, bukan semakin berkurang, impor migas kita dari Singapura ini malah semakin meningkat," tuturnya.

Untuk itu, legislator Fraksi PKS itu berharap, pemerintah baru ke depan benar-benar serius menyelesaikan masalah ini kalau memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Ia pun menilai perlu ada terobosan berarti terkait format tata kelola dan tata niaga migas ke depan.  gal/mh

Bertahan dari Penurunan Dolar

Mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sempat melemah pada awal triwulan kedua tahun ini. Dikhawatirkan picu inflasi, legislator menilai pemerintah perlu memperketat penggunaan anggarannya.

Pada 30 April 2024 kemarin, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sempat mencapai level Rp16.255. Mengingatkan pada Juni tahun 1998 dimana level rupiah jatuh di angka Rp16.800. Situasi geopolitik yang memanas di Eropa dan Timur Tengah ditengarai memperburuk kondisi mata uang nasional.

Melihat situasi tersebut, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengingatkan agar para pemangku kepentingan melakukan penanganan yang intensif supaya pertumbuhan ekonomi di Indonesia tetap dalam kondisi aman.

"Maka, jelas-jelas harus ada penanganan ekstra dari pemangku kebijakan fiskal maupun moneter. BI (Bank Indonesia) harus koordinasi. Kita perlu mengambil langkah yang

menumbuhkan 'growth' negara, dengan belanja produktif. Kita juga perlu melakukan ekspor komoditas yang mengimbangi kelemahan rupiah," terang Cucun.

Di sisi lain, politisi Fraksi PKB itu juga menyampaikan bahwa DPR telah meminta Pemerintah Indonesia untuk membuat langkah antisipasi supaya dampak negatif dari pelemahan rupiah bisa ditekan sehingga tidak menyengsarakan rakyat.

BI-Rate Naik

BI diketahui telah menaikkan suku bunganya (BI-Rate) Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan menilai kenaikan tersebut merupakan langkah antisipasi yang baik. "Saya lihat Indonesia masih cukup kuat, stabil, cadangan devisa cukup bagus dan juga BI sudah melakukan antisipasi kenaikan suku bunga



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan saat memimpin kunjungan kerja reses di Semarang.



FOTO: OJI/VEL

“ Kita perlu mengambil langkah yang menumbuhkan 'growth' negara, dengan belanja produktif. Kita juga perlu melakukan ekspor komoditas yang mengimbangi kelemahan rupiah.

Cucun Ahmad Syamsurijal, Wakil Ketua Banggar DPR RI

kemarin," ungkap Fathan.

Diketahui Bank Indonesia melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 23-24 April 2024 telah memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 6,25 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,50 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 7,00 persen.

Kenaikan suku bunga ini diupayakan dapat memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak memburuknya risiko global serta sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk

memastikan inflasi tetap dalam sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025 sejalan dengan stance kebijakan moneter yang pro-stability.

Belanja Negara

Sementara itu Anggota Komisi XI DPR RI Marinus Gea mengingatkan pemerintah untuk dapat menerapkan belanja negara yang punya prioritas penting. "Tindakan internal kita saat ini harus berhemat. Jadi hindari pembelanjaan (belanja negara) yang tidak penting," sebutnya.

Menurutnya, pemerintah harus jeli melihat pos anggaran mana saja yang perlu berhemat. Legislator Dapil Banten III ini turut mengomentari soal upaya peningkatan daya beli masyarakat. Menurutnya, pemerintah perlu turut serta mengendalikan daya beli agar sinkron dengan strategi penghematan dan penstabilan nilai



FOTO: AGUNG/VEL

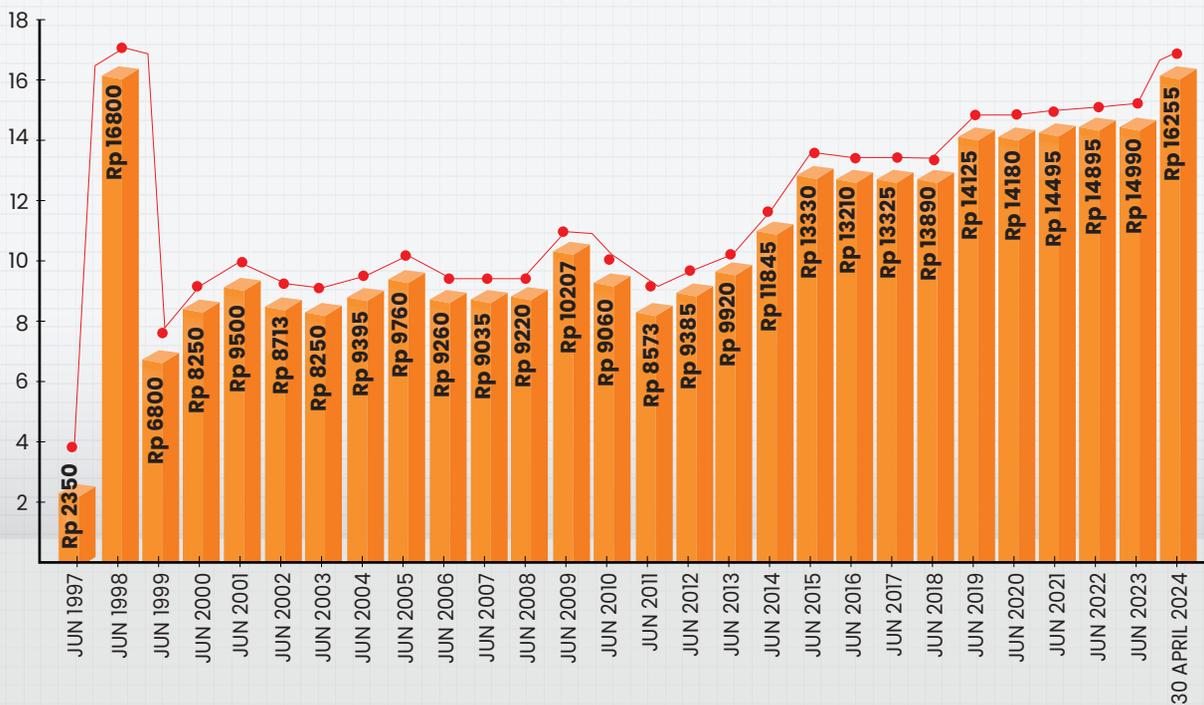
“Tindakan internal kita saat ini harus berhemat. Jadi hindari pembelanjaan (belanja negara) yang tidak penting”
 Anggota Komisi XI DPR RI Marinus Gea saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi XI di Surabaya.

tukar rupiah terhadap dolar AS.

Selain langkah internal, Marinus turut mendorong pemerintah dapat berpartisipasi menggaungkan stabilitas global di forum internasional. "Sebab faktanya, konflik

regional seperti di Timur Tengah akhir-akhir ini, lalu Rusia-Ukraina yang terus berlanjut, memang mempengaruhi," kata Politisi PDI-Perjuangan ini. **aha/mh**

NILAI TUKAR IDR TERHADAP USD DARI MASA KE MASA (PER 1 USD)



Revisi UU Pemilu

Menginventarisir Masalah Pemilu

Komisi II DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Revisi UU Pemilu. Pemutakhiran masalah pemilu pun diinventarisir untuk menciptakan pemilu maupun pilkada yang lebih baik dan demokratis.

Komisi II DPR sudah melakukan pembahasan pendahuluan dengan Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, dan DKPP, sambil menunggu keputusan rapat paripurna untuk menyetujui revisi UU Pemilu.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung, pertengahan Mei lalu, mengatakan, DPR masih memiliki dua masa sidang lagi untuk membahas revisi UU Pemilu dan Pilkada. "Kalau memang kemudian pimpinan DPR kita setuju untuk revisi, sepakat misalnya, minggu depan ada paripurna kita jalan," kata poitisi Fraksi Partai Golkar ini.

Doli menjelaskan, Panja ini akan bertugas menginventarisir segala permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pemilu. Inventarisasi masalah tersebut, lanjutnya, juga akan menjadi bahan awal pembahasan revisi UU Pemilu. "Nanti ini akan menjadi bahan awal kalau suatu saat di masa sidang ini atau di masa sidang berikutnya revisi UU atau perubahan atau penyempurnaan sistem pemilu itu dilakukan," jelas dia.

Doli menyebut Komisi II DPR RI sebenarnya telah memiliki draf naskah akademik dan draf RUU UU Pemilu sejak awal periode DPR 2019-2024. "Tapi waktu itu keburu Covid, enggak jadi. Kenapa waktu itu dibuat di awal periode, karena memang kita menginginkan bicara sistem pemilu itu tidak atau



FOTO: TARI/VEL

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia.

jauh dari pemilu yang bisa ada efek interest-nya," jelas legislator Dapil Sumatera Utara III ini.

Sementara Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mendorong segera merevisi UU Pemilu. Salah satu tujuannya agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak lagi disebut sebagai macan ompong.

Menurut Mardani, selama ini Bawaslu hanya melaksanakan kewenangan yang diatur dalam UU Pemilu dalam menjalankan tugas, termasuk saat penyelenggaraan Pemilu 2024 lalu. Oleh karena itu, kewenangan Bawaslu perlu diperluas lewat revisi UU Pemilu. "Yang perlu direvisi UU Pemilu karena



FOTO: MENTARI/VEL

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera.

tidak memberikan wewenang bagi Bawaslu untuk menindak. Untuk meningkatkan kualitas, Bawaslu perlu wewenang dan daya dukung,” kata Mardani.

Pengaturan lain yang dapat disematkan dalam revisi UU Pemilu, sambung Mardani, adalah perlindungan pelapor dugaan pelanggaran pemilu dengan pola whistleblowing seperti yang diatur dalam UU terkait pemberantasan

korupsi. “Kita bisa terapkan untuk masyarakat yang melaporkan money politics bisa mendapat penghargaan. Sebaliknya, sanksi tegas bagi mereka yang melakukan money politics,” terang Mardani.

Diketahui, wacana merevisi UU Pemilu ini kembali muncul usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengungkap perlu netralitas kekuasaan eksekutif dalam pemilu. Revisi ini diperlukan untuk menutup

celah regulasi yang berpotensi menimbulkan pelanggaran pemilu di luar masa kampanye. Pasalnya, UU Pemilu saat ini masih belum menetapkan batasan yang jelas mengenai aktivitas yang dianggap sebagai kampanye sebelum dan sesudah masa kampanye.

Ketua MK Suhartoyo juga menyoroti kelemahan dalam UU Pemilu, PKPU, dan Bawaslu. Kekosongan regulasi tersebut menghambat upaya penindakan Bawaslu terhadap pelanggaran pemilu. Penyempurnaan UU Pemilu juga diharapkan memperjelas pelanggaran administratif dan pidana pemilu, serta menjamin netralitas aparat negara, khususnya pejabat yang juga merangkap sebagai anggota partai politik atau kandidat.

DPR RI selaku pembentuk undang-undang menyambut baik wacana revisi UU Pemilu. Hal ini sejalan dengan pandangan pengamat politik dan penyelenggara pemilu yang menilai revisi diperlukan untuk menyempurnakan regulasi pemilu dan mewujudkan sistem pemilu yang lebih ideal.  we/mh

“

Selama ini Bawaslu hanya melaksanakan kewenangan yang diatur dalam UU Pemilu dalam menjalankan tugas, termasuk saat penyelenggaraan Pemilu 2024 lalu. Oleh karena itu, kewenangan Bawaslu perlu diperluas lewat revisi UU Pemilu. “Yang perlu direvisi UU Pemilunya karena tidak memberikan wewenang bagi Bawaslu untuk menindak.

Mardani Ali Sera.
Anggota Komisi II DPR RI



Wakil Ketua DPR Bidang Korinbang Rachmat Gobel di dampingi Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI-Turki DPR RI Muhammad Farhan menerima kunjungan Ketua Delegasi Majelis Agung Nasional Turkiye untuk AIPA Osman Saglam di Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5/2024). Dalam pertemuan bilateral ini, Indonesia dan Turki mempunyai kesamaan pemahaman sebagai pembela kebebasan Palestina yang gigih. FOTO : AZKA DAN PRIMA/ANDRI



Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid saat menerima Kunjungan Kehormatan (courtesy call) dari delegasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Australia, Clare O'Neil di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/5/2024). FOTO : RUNI/ANDRI





Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir, usai memimpin Rapat Kerja Komisi III dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM dalam rangka pembahasan tingkat I pengambilan keputusan atas RUU tentang Perubahan Keempat UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (13/5/2024). FOTO: KRESNO/ANDRI



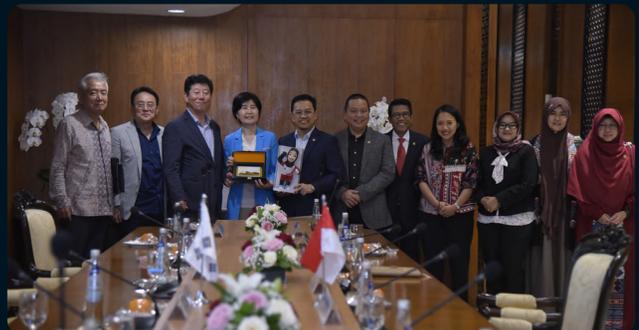
Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady memimpin pertemuan dengan delegasi DPRD Kabupaten Janeponto, Sulewesi Selatan, Selasa (4/5/2024). FOTO : OJI/ANDRI





Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, saat RDPU Komisi X DPR RI dengan Aliansi BEM SI di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5/2024). pertemuan tersebut membahas tata kelola kebijakan pembiayaan pendidikan perguruan tinggi. Posalnya, Uang Kuliah Tunggal (UKT) terkini cenderung naik signifikan namun tidak mempertimbangkan kemampuan gaji orang tua mahasiswa. FOTO: RUNI/ANDRI

Komis XI DPR RI yang di pimpin Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Amir Uskara menerima kunjungan dari perwakilan Parlemen Korea di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024). Pertemuan itu membahas beberapa hal yang berkaitan dengan investasi di sektor keuangan, mulai dari masalah ketenagakerjaan hingga regulasi dalam pembukaan cabang perbankan. FOTO : MUNCHEN/ANDRI





Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana dan Sukamta, saat peluncuran DPR RI Water Caucus secara simbolis, Sebagai langkah awal upaya nyata parlemen untuk ikut andil dalam mengatasi permasalahan air di Indonesia dan di dunia Internasional, DPR RI membentuk Kaukus Air DPR RI atau 'DPR RI Water Caucus' di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta pada Kamis (16/5/2024). FOTO: JAKA/ANDRI



Ketua GKSB DPR - Parlemen Hungaria Amir Uskara didampingi oleh Mukhammad Misbakhun saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Hungaria (H.E) Lilla Karsay di Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/5/2024). FOTO: RUNI/ANDRI



Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI "Parlemen Irlandia, Willy Midel Yoseph menerima kunjungan Duta Besar Irlandia untuk Indonesia PÁdraig Francis di ruang tamu duta besar, Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024). FOTO: MENTARI/ANDRI





Menoreh Kisah Paras Sekolah

NARASI : DEVI IRIANDI • FOTO : JAKA, DEVI, FARHAN

Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang diperingati setiap tanggal 2 Mei ditujukan untuk menghargai peran penting dunia pendidikan dalam memajukan kehidupan bangsa. Pendidikan menjadi salah satu aspek dominan dalam mendukung perkembangan peradaban suatu bangsa.

Namun, laju peningkatan mutu pendidikan di Indonesia seringkali terganjal berbagai aspek pendukung lainnya, diantaranya masalah sarana prasarana yang ada. Melonjaknya anggaran pendidikan di tanah air dirasa masih berbanding terbalik dengan realitas kelayakan sarana prasarana pendidikan yang ada. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya bangunan sekolah yang kondisinya tidak memadai untuk proses belajar mengajar.

Sejumlah bangunan sekolah berada dalam kondisi memprihatinkan, salah satunya adalah Sekolah Dasar

Negeri (SDN) II di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Bangunan sekolahnya terlihat usang, beberapa plafon tampak rusak di beberapa ruang belajar, dinding terkelupas di mana-mana, kusen jendela rapuh dan berlubang, serta ruang kelas yang tampus bila turun hujan.

Konon kabarnya, sekolah tempat para siswa menuntut ilmu tersebut tidak pernah dilakukan renovasi sejak tahun 1993. Akhirnya, kita semua berharap, ke depan tidak ada lagi bangunan sekolah yang rusak. Mimpi membangun sumber daya manusia Indonesia yang produktif dan mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi negara benar-benar dapat diwujudkan dan bukan sekadar wacana belaka. **Selamat Hari Pendidikan Nasional 2024!!!**  dev/mh





Mulyadi

Sang Pialang di Panggung Politik

Jonggol, Bogor, 1970. Di sebuah desa tertinggal, sepasang insan sedang menanti kelahiran anak ketiganya. Seketika tangis bayi mungil memecah ketegangan. Tahmid tiada henti terucap dari seorang ibu bersahaja yang baru saja menjalani persalinan



Bayi mungil laki-laki itu kemudian diberi nama Mulyadi. Adalah H.M. Syurdi dan Hj. Ratna Yuningsih sepasang insan yang sedang berbahagia dengan kelahiran anak ketiganya itu. Syurdi ayah sang bayi semakin bangga saat sang anak dikhitan. Gubernur Jawa Barat waktu itu, Solihin GP datang dengan helikopter. Mulyadi kecil menangis ketakutan, karena melihat sang gubernur mengenakan baju putih dan celana putih kebiasaannya. Mulyadi menyangkanya yang datang adalah dokter.

Sementara ibunya sang bayi, hanya seorang ibu rumah tangga biasa yang sangat mencintai keluarganya. Mulyadi kecil hidup dan tumbuh di tengah keluarga religius. Setelah kelahiran Mulyadi masih ada dua adiknya yang lahir kemudian. Jadi, Mulyadi adalah anak ketiga dari lima bersaudara.

Seperti kebanyakan anak-anak di desanya, Mulyadi kecil juga suka sekali bermain dan berinteraksi dengan sahabat-sahabat kecilnya. Mulyadi sangat suka bermain bola, bersepeda, karambol, dan mandi di sungai. Untuk sepak bola, ia biasa bermain di alun-alun Jonggol. Dan hobi bola ini, terus terbawa hingga dewasa.



Panggung politik dijadikan ladang untuk menebar manfaat bagi banyak orang.

Dulu, ayahnya juga pernah membelikan sepeda, lalu dipakainya untuk menunjukkan kemampuan pada teman-temannya. Bersepeda dengan roda depan dinaikkan dan melompati teman-temannya yang tidur berjajar, pernah dilakukannya. Senangnya mengingat masa kecil di desa.

Mengawali pendidikan formalnya, Mulyadi bersekolah di SDN 1 Jonggol. Selain belajar di SD, selepas zuhur, Mulyadi juga sekolah agama di sebuah madrasah. Ia biasa berjalan kaki ke sekolah yang jaraknya sekitar 700 m. Ketika waktu magrib tiba, ia belajar mengaji pada seorang guru yang datang ke rumahnya. Selepas mengaji, ia salat isya berjamaah

dengan keluarganya. Begitulah rutinitas kesehariannya bersama keluarga. Kewajiban menunaikan salat lima waktu sudah ditanamkan ayahnya sejak kecil.

Ketika di SD, Mulyadi sangat suka belajar angklung. Kebetulan SD-nya dikenal juga sebagai sekolah IPK (ilmu pengetahuan kesenian). Guru angklungnya sangat menyenangkan. Akhirnya, angklung jadi mata pelajaran favorit Mulyadi. Tahun 1984, Mulyadi lulus SD dan melanjutkan ke SMPN 1 Jonggol. Lalu, tahun 1987 masuk SMA Kesatuan Bogor. Ketika SMA, ia berada di jurusan fisika. Matematika jadi pelajarannya favoritnya.

Setiap hari ia naik angkot ke sekolah yang jaraknya 2 km dari rumah. Saat di SMA, ia bercita-cita menjadi arsitek. Selain penuh dengan perhitungan, dunia arsitektur juga penuh dengan cita rasa seni. Ia merasa cocok di dunia itu. Tamat SMA tahun 1990, Mulyadi mendaftar UMPTN, jurusan arsitektur UI. Selain itu, ia juga mendaftar di FISIP, jurusan Administrasi Niaga, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Kampus terakhir inilah yang ia pilih.

Bahkan, sebelumnya Mulyadi pernah mendaftar di AKABRI (kini AKMIL), tapi gagal. Pemuda Mulyadi kini mulai menggeluti pendidikan bisnis. Kapasitas intelektualnya terus terbentuk. Di kampus Parahyangan,



Foto kenangan Mulyadi kecil (berdiri kedua dari kanan) bersama kedua orangtua dan kakak adiknya

Mulyadi dikenal juga sebagai pesepak bola handal yang membuat UNPAR terkenal. Suatu hari, rektor UNPAR menantanginya, bila bisa melaju ke final pada Liga Mahasiswa Jawa Barat, ia dan tim sepak bolanya akan mendapat beasiswa.

Berada di posisi striker, Mulyadi akhirnya mampu membawa timnya ke final. Lawannya ketika itu kampus IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Namun, di final ia kalah 1-2. Walau kalah, ia dan teman-teman satu timnya tetap mendapat beasiswa yang dijanjikan sang rektor. Ada yang unik di partai final itu. Karena lawannya IAIN yang pasti semua mahasiswanya muslim, penonton di tribun pung spontan berteriak, "jihad, jihad". Teriakan itu dapat dipahami, karena lawannya adalah UNPAR yang merupakan kampus Katolik.

"Mental pemain kita drop semua. Padahal, kita juga banyak yang muslim. Kok, jadi jihad sih? Tapi, enggak apa-apa yang penting masuk final dan kita benar dapat beasiswa," cerita Mulyadi, penuh tawa. Seniornya di UNPAR yang sama-sama gila bola adalah Maruarar Sirait dan Pius Lustrilanang (keduanya mantan anggota DPR RI). Maruarar bahkan pernah menilai Mulyadi sebagai pesepak bola hebat.

Panggung Politik

Lulus kuliah tahun 1995, Mulyadi tekun mempelajari dunia pialang.

“
Dari aktivitas bisnis inilah akhirnya berlanjut ke tawaran politik. Prabowo menawarnya aktif terjun di panggung politik.”

la sekolah pialang bursa saham. Tujuannya jelas, untuk mempercepat karir profesionalnya. Mulyadi akhirnya mendapat izin perorangan (lisensi) sebagai profesional pasar modal. Apalagi, peraturan pasar modal mengharuskan setiap perusahaan pialang harus diisi oleh direktur yang sudah punya lisensi. "Akhirnya, saya menjadi direktur di banyak perusahaan yang sudah go public," ungkapnya.

Banyak sekali jabatan profesional di sejumlah perusahaan yang dipercayakan kepada mantan Ketua Bidang Transportasi dan Komunikasi DPP HIPPI ini. Dari aktivitas bisnis inilah, akhirnya mempertemukan dirinya dengan Prabowo Subianto. Pertemuan dimulai saat Prabowo pulang ke Tanah Air dari Yordania, tahun 2000. Ketika itu, Prabowo ingin memulai aktivitas bisnis yang

kebetulan berada satu grup di perusahaan investasi milik Mulyadi. Ia terpanggil untuk membantu Prabowo membuka usahanya di Indonesia.

Dari aktivitas bisnis inilah akhirnya berlanjut ke tawaran politik. Prabowo menawarnya aktif terjun di panggung politik. Dengan berpolitik, kelak Mulyadi bisa ikut merumuskan kebijakan publik yang menyejahterakan rakyat banyak. "Dalam perjalanannya beliau bikin partai. Saya dipanggil ke DPP. Saya tanya balik, DPP apa? Karena saya enggak ngerti. Sampai di DPP, saya disodorkan formulir caleg. Saya nanya lagi, caleg itu apa?" ungkap Mulyadi, menceritakan kali pertama ditawari Prabowo menjadi caleg.

Akhirnya, peraih magister manajemen agribisnis dari IPB ini, ditempatkan di dapil Jawa Barat V yang meliputi Kabupaten Bogor pada Pemilu 2009. Walau belum terpilih, tapi kemudian Mulyadi menjadi Anggota Pengganti Antar-Waktu (PAW) DPR RI, menggantikan Widjono Harjanto pada 2012. Mulyadi menggantikan posisi Widjono di Komisi VII DPR yang membidangi energi.

Saat duduk di Komisi VII, ia tertarik pada fenomena energi panas bumi yang melimpah di Indonesia. Fraksinya di DPR memasukkan Mulyadi menjadi salah satu anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Panas Bumi yang sudah dua periode tak



Bersama masyarakat di dapilnya.



Foto kenangan Mulyadi bersama teman-teman kuliahnya.



Mulyadi (ketiga dari kanan) bersama Presiden Jokowi meresmikan Tol Cijago-Serpong

kunjung disahkan. Ia tercengan ketika mengetahui bahwa kekayaan panas bumi Indonesia salah satu yang terbesar di dunia. Bila sumber daya ini dimaksimalkan, tentu bisa menyejahterakan rakyat Indonesia. Sebagai salah satu arsitek UU Panas Bumi, ia pun bertekad menyelesaikan regulasi ini hingga diundangkan.

Dari isu panas bumi inilah, Mulyadi tersadar bahwa bekerja sebagai wakil rakyat bisa bermanfaat bagi ratusan juta orang. Berbeda dengan posisinya di perusahaan yang hanya bisa membahagiakan pemilik perusahaan atau pemegang saham. Bekerja sebagai politisi dan wakil rakyat di parlemen harus dipandang sebagai pengabdian mulia, karena bekerja di jantung kebijakan untuk kesejahteraan rakyat dan kemakmuran bangsa.

Mengutip hadist nabi, Mulyadi menyebutkan, "Khoirukum anfa'uhum linnas" (sebaik-baiknya kalian adalah yang paling bermanfaat bagi manusia). Berpolitik bisa dipahami bekerja untuk kemaslahatan orang banyak. Pada konteks inilah, mantan Komisaris Utama PT. Asia Avia Megatama itu, selalu terpanggil untuk ikut mengabdikan menyejahterakan rakyat Indonesia. "Bagi saya di DPR itu pengabdian. Ini kesempatan berkontribusi untuk rakyat banyak."

Pada Pemilu 2019, ia terpilih lagi sebagai wakil rakyat dan duduk di Komisi V DPR yang membidangi

infrastruktur. Komisi ini, dipandang Mulyadi, sangat dekat dengan kebutuhan masyarakat. Selain berkiprah di Komisi V DPR, ia juga menjadi anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR hingga sekarang. Pada Pemilu 2024, Partai Gerindra memperoleh dua kursi di dapil Jabar V yang diduduki Fadli Zon dan Marlyn Maisarah. Sementara Suara Mulyadi berada di urutan ketiga.

Hobi Bersepeda

Sibuk sebagai anggota DPR RI dan pengusaha, Sekretaris Badan Pengawas dan Disiplin Partai Gerindra ini, tak melupakan kebersamaannya dengan keluarga. Di rumah ada Nurashiah Jamil, istri tercinta yang dinikahinya tahun 1999. Nurashiah sendiri adalah anak dari guru ngaji Mulyadi ketika kecil dulu. Dari

pernikahannya dengan Nurashiah, dikaruniai empat anak dan satu anak sudah meninggal dunia.

Ketiga anaknya yang tersisa adalah Nurfajrina Sabila Putri Mulyadi, Muhammad Sultan Ramadhan Putra Mulyadi, dan Nursabrina Saskia Putri Mulyadi. Bila ada libur panjang, Mulyadi mengajak keluarganya berwisata. Wisata favoritnya di dalam negeri adalah Labun Bajo atau bila ke luar negeri destinasi wisatanya adalah Istanbul, Turki.

Bicara hobi, kini mantan Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat itu, senang bersepeda terutama sepeda gunung dan olahraga jalan kaki. Kedua aktivitas fisik ini untuk menjaga staminanya. Untuk bersepeda, ia membuat even Forum Silaturahmi Pencinta Sepeda Gunung. Even ini diadakan setahun sekali dan kini sudah masuk even ke-12. Pesertanya bisa sampai tiga ribuan datang dari berbagai daerah, bahkan luar negeri.

Begitulah kiprah sang pialang di panggung politik. Penikmat ikan asin, sambal lalapan, dan sop kaki ini, selalu memanfaatkan panggung politik sebagai ladang untuk menebar manfaat bagi masyarakat luas. Peraih gelar doktor, program studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Ibnu Khaldun, Bogor itu, mendedikasikan semua kemampuan, waktu, dan materi untuk mengabdikan pada bangsa ini. **mh**



Mulyadi bersama keluarga tercinta

Mengubah KKB Menjadi OPM

Komisi I DPR RI mendukung perubahan istilah dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM). Perubahan istilah ini tentu membawa dampak paradigma baru penanganan para sipil bersenjata yang mengganggu keamanan dan kedaulatan negara di Papua.

Setidaknya inilah yang disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Sturman Panjaitan saat mengikuti kunjungan kerja ke Medan, Sumatera Utara. Ia menilai, gangguan keamanan di Papua telah menyeret kedaulatan Indonesia ke dalam pusaran konflik bersenjata. Dengan perubahan istilah tersebut, sekali lagi, penanganan yang dilakukan negara menjadi lebih tegas dan jelas dibandingkan dengan KKB.

Namun, apapun istilah yang digunakan, penanganan masalah di Papua harus satu visi dan misi, tegas Sturman di Medan, Kamis (18/4) lalu. "Berbeda cara mengatasinya. Kalau OPM itu harus dengan kekuatan militer, karena sudah menyangkut kedaulatan. Kalau KKB sekadar keamanan. (Perbedaan) persepsi ini harus dibedakan. Intinya, pemerintah harus satu, mau OPM kerjakan dengan (penanganan) OPM yang benar. Mau KKB, (penanganan) KKB yang benar," urainya.

Menurut Sturman, jika istilah yang digunakan berbeda, maka dampak yang ditimbulkan pun berbeda. Jika kepolisian menggunakan KKB karena kaitannya dengan keamanan, namun jika TNI harus menggunakan OPM. Mengingat wilayah Indonesia adalah wilayah yang berdaulat, maka TNI bisa bersikap lebih tegas, karena persoalan Papua harus dituntaskan.

"Ada satu organisasi atau kelompok yang merdeka. Harus kita



Anggota Komisi I DPR RI Sturman Panjaitan saat mengikuti kunjungan kerja reses ke Medan, Provinsi Sumatera Utara.

tuntas habis. Jadi, harus dibedakan antara OPM dan KKB. Dan tergantung bagaimana pemerintah menanggapi. Tapi, intinya harus bahu membahu, enggak ada cara lain. Pemerintah harus bahu membahu dengan aparat keamanan. Aparat kepolisian dan TNI bahu membahu dan seluruh Pemda juga. Tidak cukup cuma aparat

keamanan, Pemda pun punya andil menuntaskan semua, apakah itu OPM atau KKB," tutup politisi Fraksi PDI Perjuangan ini.

Perang Iran VS Israel

Masih di Medan, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menegaskan, penjajahan Israel



FOTO: NADYA/VEL



Ini tindakan kejahatan kemanusiaan dan masuk kategori genosida. Sehingga, dari sini saja Israel ini sudah layak untuk menjadi negara pariah (yang) tidak perlu mendapat pembelaan dari negara lain. Jadi, kita berharap, akar masalahnya segera selesai,

Anggota Komisi I Sukanta saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi I, di Medan.

terhadap Palestina merupakan akar utama masalah konflik di Timur Tengah. Karena itu, penjajahan tersebut harus segera diselesaikan, karena berdampak terhadap beberapa konflik, misalnya perang Israel versus Iran.

Israel, tegas Sukanta, telah menciptakan kondisi kelaparan di

Gaza, Palestina. Kondisi kelaparan tersebut berdampak pada malnutrisi ribuan penduduk yang mati pelan-pelan. "Ini tindakan kejahatan kemanusiaan dan masuk kategori genosida. Sehingga, dari sini saja Israel ini sudah layak untuk menjadi negara pariah (yang) tidak perlu mendapat pembelaan dari

negara lain. Jadi, kita berharap, akar masalahnya segera selesai," tegas Sukanta di Medan, Sumatera Utara, Kamis (18/4) lampau.

Diketahui, negara pariah merupakan negara yang tersingkir dalam komunitas internasional. Negara pariah mengalami isolasi internasional, sanksi, atau bahkan invasi oleh negara-negara yang menganggap kebijakan, aksi, atau keberadaannya sendiri tak dapat diterima. Adapun secara ekonomi, efek dari perang Iran tersebut akan segera terasa. Dimulai dari harga minyak yang akan naik dan juga akan diikuti dengan kenaikan nilai tukar dolar, di luar yang sekarang terjadi karena The Fed menaikkan suku bunga.

"Jadi, nanti kalau dikombinasi dengan instabilitas kawasan Timur Tengah dan kenaikan harga minyak, pasti itu akan sangat serius dampaknya bagi ekonomi negara-negara lain termasuk Indonesia," tandas politisi Fraksi PKS ini. 🐼

ndy/mh



Jika istilah yang digunakan berbeda, maka dampak yang ditimbulkan pun berbeda. Jika kepolisian menggunakan KKB karena kaitannya dengan keamanan, namun jika TNI harus menggunakan OPM. Mengingat wilayah Indonesia adalah wilayah yang berdaulat, maka TNI bisa bersikap lebih tegas, karena persoalan Papua harus dituntaskan.

Sturman Panjaitan
Anggota Komisi I DPR RI

Komisi II Soroti Kenaikan Biaya PBB

Pada kunjungan kerja ke Maros, Sulawesi Selatan, Komisi II DPR RI menyorot soal tingginya biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kenaikan ini menyusul penerbitan sertifikat tanah. Kondisi ini tentu menyulitkan masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah.



FOTO: BAGGIS/WEL

Anggota Komisi II DPR RI Rosiyati MH Thamrin saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi II ke Maros.

Anggota Komisi II DPR RI Rosiyati MH Thamrin mengemukakan kebijakan sertifikat tanah yang merugikan masyarakat. Ia menyampaikan keprihatinannya terhadap biaya PBB yang melonjak drastis setelah penerbitan sertifikat tanah. "Sangat disayangkan melihat betapa besarnya biaya PBB yang harus ditanggung masyarakat setelah memiliki sertifikat tanah. Hal ini menjadi hambatan besar bagi petani dan pengguna lahan lainnya untuk mendaftarkan tanah mereka,"

ujar Rosiyati di Maros, Sulawesi Selatan, Senin (06/05/2024) silam.

Menurutnya, masyarakat enggan membuat sertifikat tanah karena komponen biaya PBB yang meningkat secara signifikan, setelah kepemilikan tanah tersebut bersertifikat. Hal ini berdampak negatif terutama bagi para petani dan pengguna lahan lainnya yang mayoritas hidup dengan penghasilan terbatas.

Rosiyati pun menyerukan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan dinas pajak untuk meninjau ulang kebijakan tarif PBB. "Saya berharap agar dinas

“

Sangat disayangkan melihat betapa besarnya biaya PBB yang harus ditanggung masyarakat setelah memiliki sertifikat tanah.

Rosiyati MH Thamrin.
Anggota Komisi II DPR RI



kunjungan kerja kali ini bertujuan memberikan dorongan kepada pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mempercepat proses penyusunan dan pengesahan RDTR.

Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi II DPR I dengan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali dan pihak terkait lainnya di Ruang Rapat Kanwil BPN Provinsi Bali.



FOTO: OIV/VEL

pajak dapat mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak dan menyesuaikan tarif PBB dengan lebih adil," tambahnya.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu juga menegaskan bahwa pembenahan kebijakan tersebut penting dilakukan, agar masyarakat merasa lebih terbantu dan terjamin hak-haknya atas tanah yang mereka miliki. "Pemerintah harus fokus pada upaya mempermudah akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah dengan biaya yang terjangkau, sehingga tidak menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," tutupnya.

Tata Ruang Bali

Sementara di Bali, Komisi II menyoal rencana detail tata ruang (RDTR) untuk pembangunan daerah. Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman mendorong Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali bersinergi dengan Pemda Bali. Sinergi tersebut, khususnya, dalam menyelesaikan RDTR, sehingga

pembangunan bisa berjalan sesuai rencana.

"Pemerintah pusat sudah mengimbau kepada pemerintah daerah melalui kemampuan APBD-nya agar bersinergi dengan Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan masalah RDTR," ungkap Aminurokhman saat pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR dengan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali dan pihak terkait lainnya di Ruang Rapat Kanwil BPN Provinsi Bali, Senin (6/5/2024) silam.

RDTR adalah rencana terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota. Komisi II sebagai mitra kerja Kementerian ATR/BPN ingin melihat hasil yang sedang dikerjakan oleh pemerintah, terutama Kementerian ATR/BPN, dalam mempercepat implementasi RDTR di daerah.

"Rencana Detail Tata Ruang sebagai turunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sudah semestinya program ini penting untuk dilaksanakan di setiap daerah," imbuh

politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Mantan Wali Kota Pasuruan 2000-2010 ini, menambahkan bahwa kunjungan kerja kali ini bertujuan memberikan dorongan kepada pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mempercepat proses penyusunan dan pengesahan RDTR. Sehingga, pembangunan di daerah dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, Andry Novijandri dalam paparannya menjelaskan, dari 9 kabupaten/kota di Bali, 7 kabupaten/kota di antaranya sudah memiliki Perda terkait status RTRW di Provinsi Bali. Sementara 2 kabupaten/kota, yaitu Badung dan Buleleng masih dalam tahap penyusunan revisi RTRW.

"Untuk status RDTR di Bali dari target sebanyak 67 RDTR, ada 11 belum penyusunan, 32 dalam proses penyusunan, 4 sudah Linsek, 9 belum terintegrasi OSS, 11 sudah terintegrasi OSS. Dari semuanya itu baru terealisasi sebanyak 20 Peraturan Bupati (Perbup)," jelasnya.  [gys,oji/mh](#)



FOTO: BUNGA/VEL

Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta dalam foto bersama usai mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI di Denpasar, Bali.

dalam menyikapi dan menangani kasus pertambangan ilegal di wilayah hukumnya.

Turis Nakal

Di Bali, Komisi III DPR RI menyotor soal para turis yang nakal, yang kerap melakukan penyimpangan, bahkan melanggar hukum. Prilaku para turis asing ini sudah mengkhawatirkan masyarakat lokal.

Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta berharap kepada Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra agar bijak terhadap pelanggaran, sambil tetap memperhatikan dan menghormati adat serta budaya Bali. Oleh karena, menurut Wayan, Bali memiliki cara tersendiri untuk menangani turis yang berulah. Sehingga, tidak bisa serta merta langsung dilakukan deportasi.

"Karena bagaimana pun orang Bali hidup dari sektor pariwisata. Sehingga, sudah tidak asing

dengan keberadaan turis. Namun, jangan juga sampai terlalu lemah, karena turis yang berulah akan mengotori pariwisata-pariwisata yang ada, sehingga Bali bisa jatuh perekonomiannya. Jadi, harus dicari solusi yang bijak," ungkap Wayan dalam pertemuan di Denpasar, Bali, Jumat (3/5/2024) lalu.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu pun menyampaikan apresiasinya kepada Kapolda Bali, karena telah berhasil menangani banyak kasus dengan pendekatan restorative justice. Selain itu, Polda Bali juga dinilai telah bekerja sama baik dengan lembaga imigrasi yang berada di bawah lingkup Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Bali dalam penanganan kasus penyimpangan turis.

"Saya juga tentunya mengapresiasi Kapolda Bali dan segenap jajaran atas kinerjanya. Bagaimana mereka mengawasi, serta

menindak pelaporan-pelaporan yang ada terlebih mengedepankan restorative justice sebagai jalan keluar penanganan kasus," pungkasnya.

Menanggapi masukan tersebut, Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra juga sepakat dengan gagasan I Wayan Sudirta bahwa penanganan terhadap turis yang berulah harus dilakukan dengan hati-hati. Khususnya, mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor pariwisata dan kelestarian budaya Bali.

"Kami akan bekerja sama, jika diperlukan lintas sektoral untuk menemukan solusi yang menghormati adat, budaya, dan kepentingan ekonomi masyarakat Bali," ujar Ida Bagus. Kunjungan kerja reses ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju penanganan yang lebih baik terhadap turis nakal di Bali. — aar,bif/mh

Memperkuat Badan Karantina

Badan karantina membutuhkan regulasi memadai agar bisa lebih bertaji. Fungsi badan karantina sangat strategis dalam mengidentifikasi penyakit pada hewan dan tumbuhan.



FOTO: MADHEN/VEL

Anggota Komisi IV DPR RI Slamet, saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Kota Tangerang, Provinsi Banten, Selasa (21/5/2024).

Salah satu hal yang menjadi sorotan saat Komisi IV DPR RI menggelar kunjungan kerja ke Kota Tangerang, Banten. Penyakit menular dari hewan impor, misalnya, bisa dicegah oleh keberadaan badan karantina. Sebut saja penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak, bisa dicegah penularannya oleh peran karantina. Indonesia sebetulnya sudah bebas dari PMK. Namun, kemudian ini muncul lagi.

Anggota Komisi IV DPR RI Slamet mengatakan bahwa perlu penguatan regulasi agar Badan Karantina Indonesia lebih bertaji. Masih ingat,

“

Beberapa wilayah Indonesia terjangkit PMK. Salah satu penyebab penularan penyakit ini disinyalir berasal dari hewan yang diimpor ke dalam negeri.

Slamet.
Anggota Komisi IV DPR RI

pada tahun lalu dilaporkan hewan ternak di beberapa wilayah Indonesia terjangkit PMK. Salah satu penyebab penularan penyakit ini disinyalir berasal dari hewan yang diimpor ke dalam negeri. Hal ini, kata Slamet, tidak akan terjadi bila regulasi yang ada sudah kuat.

“Kalau dulu basis negaranya tidak boleh melakukan importasi selama dia belum bebas PMK, kemudian dikecilkan (dimudahkan). Di situlah letaknya regulasi dan titipan kita karantina harus tetap di situ. Makanya paling tidak regulasi ini harus kita tinjau ulang,” ujar Slamet kepada Parlemen usai Kunjungan

Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Kota Tangerang, Banten, Selasa (21/5/2024) lalu.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Hanan A. Rozak meminta Badan Karantina lebih teliti sebelum memberikan akses impor masuk ke dalam negeri. Berdasarkan informasi yang didapatkannya, diduga ada kelalaian yang dilakukan petugas saat membiarkan sapi impor dari negara terjangkit PMK masuk ke Indonesia.

"Harus lebih selektif, harus lebih teliti. Kita perlu menegakkan aturannya dengan cermat. Kalau di negara itu belum bebas penyakit PMK seharusnya kita tidak impor dari negara tersebut," ucapnya di kesempatan yang sama.

Tahun 2023 Indonesia dikejutkan dengan mewabahnya PMK ke hewan ternak. Penyakit ini ditemukan di beberapa daerah, di antaranya Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT. Bahkan, laporan dari media, tahun 2024 di Jombang, Jawa Timur masih

ditemukan hewan ternak yang terjangkit penyakit tersebut.

Budidaya Maggot

Di Makassar, Sulawesi Selatan, delagasi Komisi IV DPR RI berkunjung ke PT. Mazona Makassar Bali yang membudidayakan maggot. Budidaya maggot perlu dimasifkan untuk menghabiskan timbunan sampah. Perlu diketahui, 10 ribu maggot bisa menghabiskan 1 kg sampah organik dalam waktu 24 jam. Sisa sampah yang tidak termakan maggot tetap bisa dijadikan pupuk atau kompos organik.

"Oleh sebab itu, perlu didukung oleh pemerintah pusat dalam mengembangkannya. Kalau perlu, di beberapa tempat ada sistem pengolahan sampah ini. Sehingga, sampah yang ada di Makassar ini bisa terkendali dalam mengatasi permasalahan sampah di Kota Makassar," kata Anggota Komisi IV Azikin Solthan di Makassar, Senin (6/5/2024) lalu.

Sementara Anggota Komisi IV lainnya, Slamet menyatakan, potensi budidaya maggot untuk kelestarian lingkungan cukup bagus. Tinggal bagaimana pemerintah memfasilitasinya. Hari ini pembudidaya yang berkembang itu lebih kepada usaha sendiri, tetapi ke depan mudah-mudahan asosiasi pembudidaya maggot bisa didukung oleh pemerintah.

"Misalnya, nanti pemerintah berperan dengan disambungkan kepada para pelaku pengusaha pakan dan lain-lain, mudah-mudahan itu akan menjadi satu ekosistem bisnis yang menjanjikan. Ini ada catatan yang saya temukan, mereka memproduksinya bagus, tapi setelah itu kan tidak bisa menjual. Di sinilah kemudian peran pemerintah untuk merangkai dengan ekosistem bisnis yang memang sangat dibutuhkan, baik dunia peternakan maupun perikanan," ujar politisi F-PKS ini.

ndn,jka/mh



FOTO: IAKA/VEL

Anggota Komisi IV DPR Azikin Solthan saat mengunjungi pembudidaya Maggot PT Mesona Makassar Bali di Kota Makassar, Sulsel, Senin (6/5/2024).

Meninjau *Rest Area* Pelabuhan Merak

Jelang penggunaannya pada arus mudik lalu, rest area di Pelabuhan Merak mendapat perhatian serius Komisi V DPR RI. Rest area ini harus representatif dan terintegrasi dengan pelabuhan.

Setiap kali musim mudik tiba, Pelabuhan Merak selalu ramai dengan pemudik yang ingin menyeberang ke pulau Sumatera. Kemacetan pun mengular menuju pelabuhan. Untuk mengurai antrian panjang kendaraan menuju pelabuhan, pemangku kebijakan terkait telah menerapkan strategi zona penyangga (*buffer zone*) dengan menggunakan beberapa Tempat

Istirahat Pelayanan (*TIP*) atau rest area.

Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti memberikan apresiasi atas strategi tersebut seraya mengingatkan bahwa rest area yang digunakan harus representatif. "Rest area bisa menjadi tempat yang terintegrasi dengan pelabuhan dan lain sebagainya. Memang diperlukan rest area yang memadai ya, yang representatif," kata Novita di Tangerang, Banten pada Jumat

(5/4/2024) lalu, usai melakukan pemantauan persiapan penanganan mudik Lebaran 2024 di wilayah Banten.

Komisi V melakukan pemantauan persiapan penanganan mudik Lebaran 2024 di beberapa titik di Provinsi Banten, salah satunya di rest area KM 43 Jalan Tol Tangerang - Merak yang menjadi salah satu zona penyangga pemudik menuju Pelabuhan Merak. Selain Rest Area, tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI



FOTO: UCHA/VEL

Anggota Komisi V DPR RI, Novita Wijayanti saat memantau persiapan penanganan mudik Lebaran 2024 di wilayah Banten, pada Jumat (5/4/2024).



FOTO: INDAHEN/VEL

Anggota Komisi V DPR RI Eddy Santana saat peninjauan ke tower Airnav dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI, ke Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (05/04/2024).

juga bertandang ke Pelabuhan Merak dan Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta.

Disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI ini bahwa diperlukan beberapa layanan pendukung guna menjadikan rest area sebagai tempat yang representatif. Tak sekadar fasilitasnya, Novita juga menyinggung peran petugas yang harus sigap dalam melayani masyarakat.

"Kita memberikan masukan supaya di rest area itu tempat layanan kesehatan harus ada, kemudian bagaimana antrian tidak panjang sekali, cctv juga penting dan petugas-petugasnya juga harus cepat merespon kebutuhan masyarakat," papar politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Pada arus mudik dan arus balik Lebaran 2024 ini PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) kembali menerapkan sistem penundaan (delaying system) melalui penyediaan titik zona penyangga. Untuk pemudik yang menuju Pelabuhan Merak tersedia empat zona penyangga antara lain rest area KM 43 dan rest area KM

68 Tol Jakarta-Merak serta Lahan Munic, dan Cikuasa Atas untuk pengguna jalan non-tol.

Keselamatan Penerbangan Sementara pada kunjungan kerja Komisi V DPR ke Sulawesi Selatan, diserukan ada regulasi tegas menyangkut keselamatan penerbangan. Hal ini menyusul kasus pilot dan kopilot yang tertidur saat mengudara menuju Bandara Soekarno-Hatta. Demikian dikemukakan Anggota Komisi V DPR RI Eddy Santana.

"Saya kira ada regulasi harusnya (dari) Kementerian Perhubungan dan ini diterapkan oleh masing-masing operator. Ada tanda misalnya lampu (penanda), tidak perlu penumpang tahu, tapi kru lain tahu," ujar Eddy kepada Parlemenaria usai peninjauan ke tower Airnav dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI, ke Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (05/04/2024) lalu.

Eddy menyarankan agar kejadian ini bisa diantisipasi dengan

melibatkan kru lain di pesawat, seperti pramugari atau pramugara. Kru lain di pesawat, kata Eddy, hendaknya diberikan tanggung jawab untuk memperhatikan pilot atau kopilot yang bertugas.

Anggota Komisi V DPR RI Muh Aras pun meminta agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Menurutnya, insiden ini bukan hanya tanggung jawab satu pihak. Oleh sebab itu, ia meminta berbagai pihak yang terlibat sama-sama mencari solusi guna mencegah kejadian serupa terjadi lagi.

"Saya mengharapkan jangan sampai ini terulang. Apa upaya dari Airnav, apa upaya dari Angkasa Pura, apa upaya dari Kementerian Perhubungan agar ini menjadi perhatian utama," ujar politisi Fraksi PPP itu. Pilot dan kopilot maskapai tersebut tidur bersamaan selama 28 menit saat pesawat terbang dari Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) menuju Jakarta. Kondisi tersebut diungkapkan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

uc,ndn/mh

Komisi VI DPR Soroti BMTH

Komisi VI DPR RI sedang giat menyorot proyek pembangunan strategis nasional berupa Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) di Pelabuhan Benoa, Bali. Proyek ini tidak saja menjadikan Benoa sebagai pelabuhan tempat para turis transit, tapi bisa berwisata di Bali berlama-lama.

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi. Pada pertemuan Komisi VI DPR RI yang dipimpin Martin Manurung dengan otoritas BUMN yang membangun BMTH terungkap, proyek ini membutuhkan kerja sama semua BUMN yang terlibat. PT. Pelindo sebagai leading sector perlu dibantu Pertamina Patra Niaga dan Pertamina Gas Negara untuk memasok kebutuhan energi.

"Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19," kata Martin saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024) silam.

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Sementara di Badung, Bali, Anggota Komisi VI DPR RI Singgih Januratmoko mengapresiasi revitalisasi dua hotel yang dikelola oleh PT Hotel Indonesia Natour (HIN), sebagai bagian dari holding BUMN PT Aviata atau 'Injourney'. Dua hotel yang direvitalisasi itu adalah Hotel Grand Inna Bali Beach menjadi Bali Beach Hotel, dan The Meru Sanur. Salah satu aspek yang direvitalisasi adalah dengan menaikkan standar bintang 5+ (luxury).



FOTO: OJI/WEL

Anggota Komisi VI DPR RI Singgih Januratmoko saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI ke Badung, Bali, Senin (22/4/2022).

Dengan renovasi hotel tersebut diharapkan mampu menaikkan daya saing dengan hotel sekelasnya. Diketahui, pada bulan Oktober 2021, pemerintah resmi menunjuk perusahaan PT Aviata sebagai induk holding BUMN bidang aviasi (penerbangan) dan pariwisata, yang beranggotakan Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, Hotel Indonesia Natour, Sarinah, dan Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko.

"Terkait bisnis BUMN di sektor perhotelan, PR besar dari BUMN memang banyak hotel kita itu yang masih ketinggalan karena usia bangunannya sudah cukup lama. Sehingga, diperlukan renovasi cukup besar agar dapat kembali bersaing dengan para kompetitor dan meningkatkan kualitas layanan hotel," ungkap Singgih di Badung, Bali, Senin (22/4/2022) lalu.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menambahkan, pada 2023 lalu holding BUMN perhotelan juga melakukan rebranding hotel Grand Inna Kuta menjadi Truntum Kuta di Kuta Bali. Kuta merupakan kawasan destinasi wisata cukup strategis, sehingga sudah seharusnya fasilitas

hotelnya direnovasi agar bisa kembali bersaing.

"Memang bintangnya enggak harus 5 minimal 4 atau 3, tapi kan benar-benar daerahnya strategis, banyak wisatawan asing di sana. Harapan kita setelah direnovasi dan rebranding nanti bisa meningkatkan kuantitas hunian. Begitu juga Hotel



PT Hotel Indonesia Natour atau HIN (Persero) bergabung dalam dua holding yang sedang dibentuk BUMN, yakni holding hotel serta holding pariwisata dan pendukung. Selain sebagai operator hotel, HIN bakal melebarkan bisnisnya di hospitality industry

Singgih Januratmoko.
Anggota Komisi VI DPR RI

Grand Inna Jogja sudah lumayan dan sekarang sudah mulai ada renovasi dan kita harapkan nanti segera dibuka hotelnya dan bisa bersaing dengan hotel lainnya di Jogja," tandasnya.

Legislator Dapil Jawa Tengah V ini berharap dengan adanya renovasi hotel yang kualitasnya baik akan memberikan keuntungan yang optimal. Beberapa hotel BUMN yang telah mendapatkan profit pascarevitalisasi, salah satunya adalah Grand Inna Jogja di Malioboro, Yogyakarta. Benchmark ini, menurutnya, patut diapresiasi dan dicontoh tata kelolanya oleh hotel BUMN lainnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT. Hotel Indonesia Natour (HIN), Christinr Hutabarat menjelaskan bahwa pihaknya saat ini memang sedang melakukan renovasi sekaligus rebranding hotel-hotel yang dikelola BUMN. Hal itu agar meningkatkan kualitas layanan yang pada akhirnya mampu menaikkan tingkat hunian hotel serta keuntungan secara optimal.

"PT Hotel Indonesia Natour atau HIN (Persero) bergabung dalam dua holding yang sedang dibentuk BUMN, yakni holding hotel serta holding pariwisata dan pendukung. Selain sebagai operator hotel, HIN bakal melebarkan bisnisnya di hospitality industry," urainya.

Christinr menjelaskan untuk mencapai skala bisnis yang optimal, peran sebagai pemilik (ownership) dan operator akan dipisah dalam holding hotel BUMN. Aset hotel akan dikumpulkan di PT Wijaya Karya Realty (Wika Realty), termasuk 11 hotel milik HIN yang akan diserahkan kepada Wika Realty.

"Sedangkan komersialisasinya akan dikelola oleh joint venture antara Wika Realty dan HIN, yakni Hotel Indonesia Group (HIG). Mayoritas kepemilikan HIG dimiliki oleh HIN dengan porsi 51%, sedangkan 49% saham HIG dikantongi Wika Realty," pungkasnya. mh,oji/mh

Melihat Proyek Kilang di Teluk Bintuni

Di Teluk Bintuni, Papua Barat ada proyek kilang LNG Tangguh untuk meningkatkan kapasitas produksi nasional. Selain itu, partisipasi pekerja lokalnya juga diserukan untuk terus ditingkatkan.

terbarukan, namun gas alam lebih bersih dibandingkan energi fosil. Kita terus dukung melalui kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan keamanan pasokan energi ke depan," pungkash Sugeng, Rabu (17/4) lalu.

Lanjutnya, Sugeng bersama Komisi VII DPR RI mengapresiasi kinerja British Petroleum (BP) Tangguh. Melihat kinerja BP Tangguh telah berkontribusi signifikan untuk pendapatan



FOTO: DIPA/VEL

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto, saat meninjau LIGN Tangguh, Teluk Bintuni, Papua Barat, Rabu (17/04/2024).

Proyek yang menghasilkan gas alam ini diharapkan terus ditingkatkan untuk menjadi energi utama di Indonesia. Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menyampaikan, energi fosil yang

telah menyumbang emisi cukup tinggi, maka pengembangan gas alam menjadi keniscayaan untuk terus dikembangkan menggantikan energi fosil.

"Walaupun gas alam bukan merupakan energi baru dan

negara. "BP Tangguh sejauh ini telah menghasilkan 30 persen lifting gas nasional. Hal ini perlu kita dukung untuk pembangunan yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran industri hulu migas di era transisi energy," ungkapnya.

Pada bagian lain, Sugeng juga menyrukkan agar tenaga kerja lokal diakomodir secara maksimal pada proyek ini. Diketahui, ada sekitar 70 persen pekerja lokal yang bekerja di BP Tangguh ini. Peningkatan partisipasi pekerja lokal perlu ditingkatkan lagi hingga 80 persen.

Pembangunan Smelter

Sementara di Manado, Sulawesi Utara, ada persoalan dengan pembangunan perusahaan smelter, karena kurangnya pasokan listrik. Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Hermanto mendorong sinergi antar-BUMN harus ada. Masing-masing BUMN harus bervisi yang sama soal ini dan memiliki rasa kepemilikan bersama (sense of belonging) yang tinggi. Sehingga, ketika ada satu BUMN yang dihadapkan pada persoalan tertentu harus ada BUMN lain yang bisa membantu.

"Salah satu yang paling memungkinkan adalah bekerja sama sama dengan PLN. Karena PLN menjadi penyedia listrik di Indonesia yang sudah siap dengan segala sesuatunya. Ketika terjadi kerja sama dengan PLN, ya mudah-mudahan masalah (kurangnya suplai listrik) ini bisa segera teratasi," kata Bambang di Manado, Sulut, Kamis (18/4/2024) silam.

“

Salah satu yang paling memungkinkan adalah bekerja sama dengan PLN. Karena PLN menjadi penyedia listrik di Indonesia yang sudah siap dengan segala sesuatunya. Ketika terjadi kerja sama dengan PLN, ya mudah-mudahan masalah (kurangnya suplai listrik) ini bisa segera teratasi

Bambang Hermanto
Anggota Komisi VII DPR RI



FOTO: AREF/VEL

Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Hermanto saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses, di Manado.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu berharap, mendapatkan solusi dari persoalan yang dialami PT Antam, yaitu mendorong PLN untuk bisa membantu agar smelter feronikel di Halmahera Timur bisa berproduksi. "Mendengar apa yang disampaikan oleh Antam bahwa karena suatu

hal yang tidak bisa terpenuhi yang akhirnya sampai hari ini mangkrak semua," terangnya.

Ia pun menyoroti ketika ada industri yang akan membangun smelter apapun kondisinya, maka ketersediaan listrik (power supply) semestinya menjadi tahapan awal. Namun, yang sekarang terjadi, semua infrastruktur sudah terbangun tapi sumber energi listriknya belum, sehingga akhirnya saat ini smelter belum bisa diproduksi.

"Harusnya power supply menjadi bahan dasar hal yang sangat vital karena tidak akan mungkin bisa bekerja tanpa ada power. Apalagi, kita mau berproduksi yang notabene smelter itu sangat membutuhkan energi yang cukup besar, yaitu energi listrik. Kenapa (persoalan sumber listrik) itu tidak dilakukan terlebih dahulu, kenapa baru munculnya sekarang," pungkasnya. — dip, afr/mh

Melihat Embarkasi Medan yang Inovatif

Ada kolaborasi menarik antara embarkasi Medan, Sumatera Utara dengan Bank Sumut Syariah. Kolaborasi ini menciptakan lounge haji yang menarik yang bisa dinikmati para calon jemaah haji asal Sumut.

Dalam layanan lounge haji tersebut, jemaah haji dapat merasakan berbagai layanan seperti penukaran rial, pembukaan tabungan, bahkan layanan relaksasi bagi jemaah yang kelelahan saat tiba di asrama haji. Komisi VIII DPR RI tentu mengapresiasi lounge haji ini.

Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang yang memimpin delegasi Komisi VIII merasakan layanan eksklusif tersebut. Ia mengapresiasi Embarkasi Medan yang aktif bekerja sama dengan stakeholder lain untuk memberikan layanan optimal bagi jemaah haji. Layanan ini, diketahui merupakan layanan yang baru ada di tahun 2024 ini.

"Hari ini ada yang baru di Embarkasi (Medan), Bank Sumut Syariah bekerja sama (dengan Embarkasi Medan). Jadi, ada tempat duduk nyaman, mau selonjor ada, mau kursi pijat ada, sambil mendengarkan tausiah-tausiah berkaitan dengan ibadah haji. Ini luar biasa," apresiasi politisi Fraksi PKB ini.



FOTO: BIANCA/VEL

Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang saat meninjau lounge haji di Embarkasi Medan.

Legislator Dapil Sumatera Utara II ini pun mendorong pihak swasta

“

Jadi, ada tempat duduk nyaman, mau selonjor ada, mau kursi pijat ada, sambil mendengarkan tausiah-tausiah berkaitan dengan ibadah haji. Ini luar biasa

Marwan Dasopang
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI

lainnya untuk membuka kerja sama dengan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada jemaah haji asal Indonesia. Sebagai informasi, hadirnya Bank Sumut Syariah di Asrama Haji Medan merupakan layanan yang diberikan, mengingat mayoritas jemaah haji asal Sumatera Utara merupakan nasabah Bank Sumut Syariah yang sudah lama menabung untuk keberangkatan haji mereka tahun ini.

Sementara itu, Bandara Internasional Kualanamu, Medan, Sumatera Utara, menjadi salah satu bandara yang melayani penerbangan teknikal landing untuk pemberangkatan haji tahun 2024. Sebanyak 204 penerbangan diketahui akan menjalani technical

landing pada pemberangkatan haji tahun ini untuk mengisi bahan bakar di bandara tersebut.

Menjadi bandara yang melayani technical landing, membuat Medan memiliki tanggung jawab lebih terhadap jemaah haji asal Indonesia. Melihat pengalaman pemberangkatan haji tahun lalu, Marwan menjelaskan, ada beberapa kejadian ketika pemberhentian pesawat di Kualanamu yang perlu menjadi perhatian. Misalnya, adanya jemaah haji yang mengalami sakit saat transit di Kualanamu.

Hingga kini, lanjut Marwan, masih belum ada standar operasional yang jelas dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga perlu diatur lebih lanjut dengan pengalokasian anggaran yang jelas hingga pihak mana yang harus menangani permasalahan tersebut.

"Ketika technical landing berada di Kualanamu, ada jemaah

“
Ketika technical landing berada di Kualanamu, ada jemaah yang sakit, ada jemaah yang harus turun, itu anggarannya tidak ada di sini. Maka, siapa yang menanggung ini? Itu ya tadi laporan ketika ditangani (maskapai) Garuda, dialah yang menanggung biayanya mengantar ke rumah sakit, pengobatan.

Marwan Dasopang
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI

yang sakit, ada jemaah yang harus turun, itu anggarannya tidak ada di sini. Maka, siapa yang menanggung ini? Itu ya tadi laporan ketika ditangani (maskapai) Garuda, dialah yang menanggung biayanya mengantar ke rumah sakit, pengobatan. Ketika itu ditangani oleh Kemenag, Kemenag yang akan menanggung nanti akan ditagih. Menurut kami, menagih ini tidak mudah," jelasnya kepada Parleментарia, di Medan, Sumatera Utara, Kamis (16/5/2024) lalu.

"Ke depan kami akan bicarakan di Komisi VIII supaya itu disiapkan anggaran di sini, supaya tidak terjadi tolak menolak nanti Pak Ramlan sebagai UPT di sini ya jauh-jauh dari situasi itu supaya mengambil tanggung jawab. Nah, ini jangan terjadi seperti itu. Ya, nanti akan bicarakan di komisi VIII," lanjutnya. **bia/mh**



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat kunspek Komisi VIII di Medan, Sumatera Utara, Kamis (16/5/2024).

FOTO: BIANCA/VEL

Mengembangkan Wisata Kesehatan

Ada hal menarik di Badung, Bali. Ini tidak bicara wisata konvensional, melainkan ada konsep wisata kesehatan yang menarik yang sedang dikembangkan. Sebuah rumah sakit daerah telah mengembangkan *medical tourism* yang sangat bermanfaat bagi masyarakat luas.

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengapresiasi RSD (Rumah Sakit Daerah) Mangusada, Badung, Bali yang memiliki berbagai keunggulan termasuk konsep *medical tourism* (wisata kesehatan).

"RSD Mangusada itu rumah sakit tipe B, bagus, baik dari layanan keunggulannya, bahkan ke depan sudah disarankan untuk rumah sakit unggulan radioterapi, termasuk juga konsep tentang *medical tourism*," ujar Edy, Sabtu (11/5) di Badung, Bali silam.

Wisata kesehatan sendiri merupakan kegiatan perjalanan wisata untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Hal inilah yang menjadi salah satu konsen pemerintah, terutama bagi daerah wisata seperti Bali, untuk dapat menarik perhatian wisatawan mancanegara. Edy menambahkan, konsep wisata kesehatan yang sedang dipersiapkan RSD Mangusada menjadi jawaban pemerintah yang sebelumnya menyayangkan sebanyak Rp170 triliun uang devisa negara mengalir ke luar negeri akibat banyaknya warga negara Indonesia (WNI) yang berobat ke luar negeri.

"Saya berharap Rumah Sakit Daerah Badung ini menjadi salah satu pilot project untuk *medical tourism*, terutama untuk menangkap turis-turis yang memang jalannya dari negara-negara maju," jelas politisi Fraksi PDI Perjuangan ini.

RSD Mangusada sedang mempersiapkan *medical tourism*



FOTO: BIANCA/VEL

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto saat meninjau fasilitas dan pelayanan RSD Mangusada di Badung, Bali, Sabtu (11/5/2024).



Ini temuan yang sangat baik untuk ditindaklanjuti oleh BPJS Kesehatan. Semua peserta BPJS tidak boleh ada pembatasan hari sampai dinyatakan dokter sudah sehat dan bisa dinyatakan pulang

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo, saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI di Tabanan, Provinsi Bali, Sabtu (11/5/2024).



FOTO: CHASBI/WEL

dalam bidang geriatri atau salah satu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari keadaan-keadaan fisiologis dan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan orang-orang lanjut usia dengan fokus pada penuaan dini. Konsep wisata kesehatan ini guna untuk menarik perhatian warga negara asing untuk dapat berobat sekaligus berlibur ke Bali.

Pasien BPJS Kesehatan

Di Tabanan, Bali, persoalan pelik kembali terjadi. Ini menyangkut pasien dengan BPJS Kesehatan yang dipulangkan rumah sakit dalam kondisi belum sepenuhnya sehat. Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengatakan bahwa ada beberapa rumah sakit bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yang mewajibkan pasien pulang dalam kondisi belum sehat.

"Bukan hanya di Bali, di berbagai daerah juga sering kami temukan hal tersebut. Tetapi, setelah kami kroscek di BPJS tidak ada aturan seperti itu," katanya saat diwawancarai Parlemenaria di Tabanan, Bali, Sabtu (11/5/2024) silam. Politisi Fraksi PDI Perjuangan

itu melanjutkan bahwa tidak ada batasan masa waktu rawat inap bagi peserta BPJS Kesehatan. Karena itu, kasus tersebut, menjadi temuan untuk segera ditindaklanjuti.

"Ini temuan yang sangat baik untuk ditindaklanjuti oleh BPJS Kesehatan. Semua peserta BPJS tidak boleh ada pembatasan hari sampai dinyatakan dokter sudah sehat dan bisa dinyatakan pulang," jelasnya.

Politisi Dapil Jawa Tengah V itu menegaskan bahwa jika ada rumah sakit yang memulangkan pasien BPJS yang belum layak dipulangkan maka rumah sakit tersebut harus diberi sanksi.

Masih di Tabanan, RSUD Tabanan yang berdiri sejak tahun 1953, di atas tanah seluas 1.610 meter persegi, bangunannya sudah tua dan memerlukan perluasan pembangunan serta tenaga medis, khususnya ketersediaan dokter spesialis. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan bahwa pelayanan di RSUD Tabanan sudah cukup bagus dan kondisi bangunan bersih.

"Terkait tenaga kesehatan, kita (Komisi IX) dorong mereka supaya

bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang nantinya lulusan-lulusan Udayana bisa langsung bekerja di RSUD Tabanan. Kemudian terkait Alkes, kami juga dorong untuk segera mengajukan ke Kementerian Kesehatan agar langsung bisa dieksekusi karena ini sudah urgen," katanya saat diwawancarai Parlemenaria, usai Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi IX ke Tabanan, Bali, Sabtu (11/5/2024) silam.

Politisi Fraksi PKB itu melanjutkan bahwa kebutuhan Alkes dan SDM tersebut sudah sangat urgen mengingat kondisi RSUD Tabanan saat ini memiliki banyak pasien. Sehingga, Komisi IX DPR RI mendorong pemerintah segera merealisasikan kebutuhan RSUD Tabanan dalam waktu dekat. Direktur RSUD Tabanan I Gede Sudiarta mengatakan bahwa total karyawan saat ini baru 973 orang dan masih membutuhkan perluasan pembangunan. "Kita masih butuh dokter spesialis lagi, kita juga perlu untuk perluasan area parkir dan pembangunan gedung," katanya.  cas, bia/mh

Memanfaatkan Perpustakaan Digital

Beberapa provinsi telah melakukan digitalisasi perpustakaan agar mudah diakses para siswa dan masyarakat. Di Sumatera Utara, perpustakaan telah tersambung ke setiap sekolah secara digital, sehingga para siswa bisa mengaksesnya kapan pun untuk memenuhi kebutuhan literasi.

Pada kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Sumut, ada yang menarik untuk dicermati. Perpustakaan provinsinya sudah terdigitalisasi. Setidaknya inilah yang diapresiasi Anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa Amaliah. Fasilitas digitalnya telah terintegrasi dan disediakan ke sekolah-sekolah menengah atas dan kejuruan. Namun, baru sekitar 20 persen dimanfaatkan oleh sekolah.

"Alhamdulillah sudah mulai terintegrasi di Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Utara, digitalisasi sudah dilakukan dan sudah ditawarkan. Tadi saya sudah diskusi dengan beberapa staf, dan terungkap bahwa meskipun link, akun, dan password sudah diberikan kepada sekolah-sekolah, baru 20% yang menggunakannya," ungkap Ledia di Kota Medan, Sumut, Senin (6/5/2024) lalu.

Ledia menyampaikan, digitalisasi bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk meminimalisir biaya dan memudahkan para siswa mengakses buku-buku. "Biasanya perpustakaan sekolah itu udah paling pojok, berdebu, enggak ada tempatnya, enggak ada bukunya. Pengadaan buku itu besar biayanya, tapi kalau mereka kemudian mengakses ini bisa meminimalisir biaya dan



FOTO: SINGGIH/VEL

Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi X DPR RI, di Kota Medan Sumatera Utara, Senin (06/05/2024).

memudahkan siswa mengakses buku-buku," ungkapnya.

Ledia juga menyampaikan bahwa digitalisasi memberikan akses ke buku-buku dalam bahasa asing, termasuk bahasa Inggris, yang sebelumnya sulit dijangkau oleh para siswa. "Tadi ada siswa-siswa di sini yang kemudian bisa meminjam buku dalam bahasa Inggris, meskipun ditanya bisa bahasa Inggris ya? Terus dibilang sedikit-sedikit. Nah, itu saja sudah satu nilai tambah," tutur Ledia.

Dalam menghadapi tantangan ini, Ledia menekankan pentingnya kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan Dinas Perpustakaan untuk mendorong penggunaan sumber daya digital ini. "Prosesnya adalah bagaimana dorongan dari pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan mereka berkolaborasi bahwa ada semacam kewajiban bagi guru, bagi siswa yang mengakses tadi link yang diberikan," tuturnya.



FOTO: AYU/VEL

Anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Nur Purnamasidi saat Kunjungan Kerja Reses ke Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Lebih lanjut, Ledia berharap bahwa penyediaan buku juga bisa diintegrasikan dengan Perpustakaan Nasional, sehingga mengurangi kekhawatiran tentang pengadaan buku fisik dari luar daerah. "Sehingga tidak harus berpikir bahwa ini mau mendatangkan buku dari mana, nanti yang ada anggarannya adalah bagaimana menghidupkan para penulis-penulis di setempat lokal untuk membuat buku-buku yang baik, sehingga mereka tertampung dan itu menjadi kekhasannya provinsi tersebut dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain," kata Ledia.

Dengan perbaikan sistem dan peningkatan kolaborasi antardinas, diharapkan bahwa pemanfaatan sumber daya digital di perpustakaan daerah dapat meningkat, memberikan manfaat yang lebih luas bagi dunia pendidikan di Sumatera Utara.

Pajak Hiburan

Di Sulawesi Selatan, Komisi X DPR menerima keluhan para pengelola hotel dan restoran soal pajak hiburan yang naik tajam. Komunitas yang

tegabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) itu, meneguhkan kenaikan pajak yang sampai 75 persen.

"Dalam Reses kali ini ke Provinsi Sulawesi Selatan, sejatinya kami terima banyak aspirasi, masukan dan keluhan dari berbagai stakeholder terkait. Namun khusus untuk industri Pariwisata dan hiburan kami terima keluhan senada dengan pelaku industri hiburan di daerah lainnya," ujar Anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Nur Purnamasidi kepada Parlemen, di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Senin (6/5/2024) lalu.

Kenaikan pajak hiburan dan pariwisata ini sebagai dampak dari telah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). UU tersebut lalu diturunkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 yang telah disahkan pula oleh DPRD Kota Makassar.

Sebagai informasi dalam pasal 58 ayat 1, tarif PBJT (pajak barang dan jasa tertentu) ditetapkan maksimal 10

persen. Namun, Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa, pemerintah menetapkan tarif pajak minimal 40 persen dan maksimal 75 persen.

Oleh karena itu, PHRI Sulsel yang diwakili oleh ketuanya Anggiat Sinaga menolak kenaikan pajak hiburan malam di Makassar yang naik 75 persen. Pasalnya, ia menilai regulasi tersebut tidak manusiawi dan akan berdampak pada jumlah kunjungan hiburan malam yang pasti akan menurun drastis. Bahkan, tambahnya, kenaikan ini bisa menyebabkan matinya industri hiburan malam. Hingga akhirnya akan meningkatkan angka pengangguran.

Menanggapi hal tersebut, Pur, begitu M. Nur Purnamasidi ini biasa disapa, berjanji saat masa sidang dibuka pada pekan mendatang akan menyampaikan dan mendiskusikannya kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai mitra kerja Komisi X DPR RI. [skr,ayu/mh](#)

Mengantisipasi Rencana Kenaikan PPN

Rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) terus diantisipasi dan diamati Komisi XI DPR RI. Kenaikan PPN tersebut direncanakan sebesar 12 persen dan mulai diberlakukan awal tahun 2025 nanti. Situasi ekonomi global juga akan terus dipantau bersamaan dengan rencana kenaikan PPN ini.



FOTO: GALUH/VEL

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan, saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi XI di Semarang, Jawa Tengah, Senin (28/04/2024).

Pada kunjungan kerja Komisi XI DPR ke Jawa Tengah, Wakil Ketua Komisi XI Fathan membincang soal ini saat menggelar pertemuan dengan para mitra kerjanya di Semarang, Senin, (29/4) lalu. Rencana kenaikan ini terkait amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

"Ya memang ada beberapa pertimbangan (untuk menaikkan PPN). Karena ekonomi baru tumbuh kemudian sektor konsumsi juga baru menggeliat, orang baru benah-benah toko. Tapi itu kan keputusan bersama antara pemerintah dan DPR, karena kita juga melihat APBN butuh

beberapa pendapatan dari sektor pajak. Oleh karena itu, nanti kita lihat bagaimana situasi ekonomi dan kita akan putuskan kemudian," ujar Fathan

Meski belum dibahas dalam waktu dekat, lanjutnya, rencana kenaikan PPN ini akan dipertimbangkan untuk dikaji ulang dengan mencermati kondisi perekonomian global. Indonesia

diserukannya harus waspada terhadap situasi global ke depan. Menteri Keuangan juga akan memberi masukan soal ini dan mendengar opsi-opsi lain.

Diketahui, jika kebijakan PPN sebesar 12 persen ini akan diberlakukan, maka Indonesia akan menempati negara dengan PPN tertinggi di Asia Tenggara bersama dengan Filipina yang juga memiliki tarif PPN sebesar 12 persen.

Masih di tempat yang sama, Fathan juga membincang soal pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Politisi PKB tersebut, menilai, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah telah tumbuh positif. Ia pun mendorong agar OJK dan Himbara dapat memberikan penekanan antensi dan afirmasi terhadap UMKM dan pertanian agar porsinya lebih besar, sehingga dapat memberikan kontribusi lebih terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.

"Saya melihat bahwa Himbara telah bekerja dengan baik, OJK juga telah mendorong situasi kondusif. Beberapa hal yang menjadi atensi kita, misalnya, pertanian dan UMKM kita dorong supaya porsinya lebih besar sehingga memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah," ungkap Fathan

Pertumbuhan positif ekonomi di Jawa Tengah ini terlihat dari perkembangan dana pihak ketiga (DPK) Jawa Tengah per Februari 2024 ini sebesar 8,08 (yoy) yang didukung dengan pertumbuhan giro sebesar 15,68 persen (yoy), deposito 12,42 persen (yoy), dan tabungan 4,03 persen (yoy). Serta perkembangan kredit yang juga tumbuh positif sebesar 7,34 persen (yoy).

Sementara di Jawa Timur, Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurniawati mengapresiasi penerimaan negara Jatim yang melebihi rata-rata perolehan nasional.



Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurniawati, saat kunjungan kerja di Surabaya, Jawa Timur, Senin (29/4/2024).



Prestasi ini tak lepas dari direktorat tersebut yang telah menerbitkan ND-52/PJ/2024 tanggal 27 Februari 2024 sebagai dasar galpot KLU sektoral nasional.

Indah Kurniawati,
Anggota Komisi IX DPR RI

Menurut data Kementerian Keuangan, realisasi pendapatan negara di Jatim tahun 2023 berkisar 102% dari target, sementara realisasi tingkat nasional kisaran 101% dari target sebelumnya.

"Antara target dengan realisasi tidak jauh-jauh amat. Dari sisi kepatuhan, semuanya sesuai dengan target. Maka untuk itu, kami berikan apresiasi," ujar legislator Dapil Jatim I itu ditemui saat kunjungan kerja di Surabaya, Jatim, Senin (29/4/2024) lalu.

Tingginya perolehan Jatim memang tak mengherankan. Sebab, provinsi ini dikenal sebagai wilayah industri dengan tingkat produktivitas yang tinggi. "Kalau lihat bea cukai di Jatim, di sini memang banyak pabrik dan industrinya. Memang Jatim pendapatannya punya kontribusi besar bagi negara," ungkap Indah.

Bahkan, capaian Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jatim per kuartal 1 2024 saja memperoleh realisasi 22,5% dari total target tahun ini yang mencapai Rp121,13 triliun. Tingkatan realisasi ini lebih besar dibandingkan realisasi nasional berada di kisaran 20,33% dari targetnya tahun 2024 ini.

Adapun menurut perwakilan DJP yang hadir, prestasi ini tak lepas dari direktorat tersebut yang telah menerbitkan ND-52/PJ/2024 tanggal 27 Februari 2024 sebagai dasar galpot KLU sektoral nasional. Setidaknya terdapat 60 KLU yang terdiri dari industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, aktivitas keuangan, real estate, aktivitas kesehatan, pengadaan listrik, konstruksi, informasi dan komunikasi, pertambangan, pengangkutan dan pergudangan, pertanian, kehutanan, dan perikanan. gal,aha/mh

Visa Khusus untuk Berhaji

Memasuki musim haji tahun ini, Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan tegas bahwa untuk berhaji harus menggunakan visa khusus haji. Tidak ada lagi visa lain selain visa haji untuk menunaikan rukun Islam kelima tersebut.

kunjungan yang akan dipakai oleh orang Indonesia di-cut di imigrasi, tidak boleh berangkat," ujar Marwan dalam keterangan tertulis yang diterima Parlemen, pertengahan Mei lalu.

Marwan juga menerima laporan di antara jemaah umrah WNI itu mengaku berniat untuk haji tanpa visa haji, yang artinya hal tersebut sama dengan haji secara ilegal atau tidak resmi. Masyarakat yang berangkat haji dengan cara yang tidak resmi pun nanti



FOTO: BIANCA/VEL

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, saat melepas keberangkatan jemaah haji kloter 4 di Embarkasi Medan.

Persoal ini jadi perbincangan hangat di Tanah Air. Tak ketinggal, Komisi VIII DPR RI yang membidangi persoalan haji angkat bicara soal ini. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah soal visa ini. Menurutnya, ini menjadi upaya

mencegah masyarakat yang ingin berhaji tanpa prosedur resmi menggunakan visa turis atau kunjungan.

"Memang kunjungan ini hak seseorang ke Saudi. Tapi, ngapain berkunjung ribuan orang pada bulan-bulan haji? Itu ada motif, maka karena itu, kunjungan, nanti kami ingin mengajak pemerintah pada saat bulan-bulan haji, visa

dikhawatirkan status hajinya tidak memenuhi standar pelaksanaan ibadah haji. Terlebih, Pemerintah Arab Saudi memperketat pengawasannya.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq, menegaskan, pemerintah dan agen travel turut memberi imbauan agar mengedukasi masyarakat terutama umat Islam, untuk tidak

melakukan perjalanan ibadah haji tanpa visa resmi. "Saya mengimbau kepada pemerintah, juga kepada para agen travel haji dan umrah agar mengedukasi masyarakat," kata Maman dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema "Antisipasi Maraknya Jemaah Haji dan Umroh Tanpa Visa Resmi" di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Selain itu, diharapkan jangan sampai ada jemaah yang berani masuk ke negara lain, terutama ke Arab Saudi untuk melakukan ibadah haji tanpa visa, seraya mengingatkan ada sejumlah sanksi apabila masyarakat nekat mengikuti perjalanan ibadah haji tanpa visa resmi. Dijelaskannya, saat ini Pemerintah Arab Saudi telah menyebut bahwa mereka bisa mendeportasi jemaah dan melarang mereka kembali ke negara tersebut hingga 10 tahun mendatang.

Tak cukup sampai di situ, jemaah dengan visa non-haji belum tentu bisa lolos untuk melaksanakan ibadah wukuf di Arafah saat puncak haji, sebab Pemerintah Arab Saudi akan memperketat aturan saat puncak haji.

Tindak Tegas Agen Pelanggar

Kementerian Agama diingatkannya agar menindak tegas

“

Di antara jemaah umrah WNI itu mengaku berniat untuk haji tanpa visa haji, yang artinya hal tersebut sama dengan haji secara ilegal atau tidak resmi. Masyarakat yang berangkat haji dengan cara yang tidak resmi pun nanti dikhawatirkan status hajinya tidak memenuhi standar pelaksanaan ibadah haji. Terlebih, Pemerintah Arab Saudi memperketat pengawasannya.

Marwan Dasopang,
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI



Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq saat menghadiri secara virtual acara diskusi Dialektika Demokrasi.

agen travel yang telah terbukti menyalahi aturan dengan jelas memberangkatkan jemaah haji tanpa visa yang resmi.

Sebelumnya, Kementerian Agama telah menegaskan bahwa hanya visa khusus haji yang dapat digunakan jemaah calon haji untuk melaksanakan ibadah haji di Makkah, Arab Saudi.

Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kemenag RI Akhmad Fauzin

menjelaskan penggunaan visa haji telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Pihak-pihak yang ketahuan berhaji secara tidak resmi akan diamankan oleh pihak Saudi.

Sebagaimana disiarkan kantor berita Saudi SPA, sanksi bagi pelaku haji ilegal dikenai denda sebesar 10.000 riyal atau di kisaran Rp40 juta. Pelaku haji ilegal juga akan dideportasi ke negara asal dan dilarang memasuki Arab Saudi dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai hukum.

Adapun pihak yang membawa masuk jemaah haji tanpa izin akan dikenakan sanksi berat. Jika dakwaan terbukti, mereka akan dihukum enam bulan penjara dan denda 50.000 riyal atau sekitar Rp200 juta. Otoritas setempat juga akan menyita sarana transportasi yang digunakan untuk mengangkut haji ilegal sesuai dengan putusan pengadilan dan pengangkut ekspatriat akan dideportasi. **pun/mh**

Nusa Dua *Communique* Komitmen Parlemen Dunia untuk Air



FOTO: OJI/VEL

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani, saat menyampaikan pidato penutupan Parliamentary Meeting on The Occasion of The 10th WWF di Nusa Dua, Bali, Selasa (21/5/2024).

Seperti air yang mengalir menjadi sumber kehidupan, parlemen juga tak ubahnya menjadi unsur penting dalam kehidupan sebuah negara. Mengalirkan aspirasi masyarakat menjadi sebuah kebijakan menuju masyarakat yang lebih sejahtera.

Untuk itulah, sebanyak 231 delegasi parlemen dari 49 negara berkumpul di Nusa Dua, Bali dalam pertemuan Forum Air Dunia (*World Water Forum*) ke-10. Pertemuan parlemen ini

berusaha memposisikan air sebagai salah satu prioritas pembahasan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, mengingat permasalahan air menjadi salah satu agenda dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Menggaungkan tema 'Memobilisasi Aksi Parlemen Mengenai Air untuk Kesejahteraan Bersama', DPR sebagai tuan rumah berusaha mempertegas peran politik dan mobilisasi aksi parlemen untuk menghadapi krisis air dunia. *Parliamentary Meeting on The Occasion of The 10th World Water Forum* pun membahas tentang air sebagai inti dari aksi iklim, serta diplomasi air, kerja sama, dan ilmu pengetahuan untuk perdamaian.

Pertemuan parlemen dunia tersebut telah menyusun 'Nusa Dua

Communique' sebagai wujud upaya bersama Parlemen untuk mengatasi krisis air. Dalam *Communique* itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan, parlemen dunia meneguhkan komitmen untuk memperbaiki alokasi sumber daya dan anggaran yang proporsional untuk air bersih.

Poin-poin penting yang tercantum dalam 'Nusa Dua *Communique*, yaitu pertama, menjadikan upaya mengatasi krisis air sebagai bagian dari percepatan pencapaian SDGs. Kedua, mendorong pengelolaan air yang mengedepankan pemenuhan hak asasi manusia. Ketiga, memaksimalkan peran pengawasan parlemen dan partisipasi publik untuk menyelesaikan berbagai hambatan terhadap akses air.

Keempat, meningkatkan inklusivitas perumusan kebijakan tentang air. Kelima, memastikan air menjadi bagian yang terintegrasi dengan strategi nasional adaptasi perubahan iklim. Serta keenam, mendorong pembiayaan yang inovatif untuk tata kelola air.

Terkait komitmen menjadikan upaya mengatasi krisis air sebagai bagian dari percepatan pencapaian SDGs, Puan menjelaskan, parlemen global telah sepakat memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan air di lembaga legislatif masing-masing negara. "Kami sepakat memastikan air menjadi salah satu agenda utama parlemen dan dimasukkan ke dalam komite parlemen atau struktur lainnya," jelas politisi Fraksi PDI Perjuangan ini.

Parlemen dunia juga telah berhasil membahas poin-poin penting dan rekomendasi sejalan dengan tema '*Mobilizing Parliamentary Actions on Water for Shared Prosperity*'. "Yaitu air untuk kesejahteraan seluruh manusia tanpa terkecuali. Bersama-sama, kita sepakat untuk menjadikan isu air sebagai agenda prioritas parlemen di negara kita masing-masing dan juga pada tingkat global," ungkapnya.



FOTO: GJI/VEL

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon saat menyampaikan pidato dalam pembukaan agenda Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia ke-10 Tahun 2024 di Nusa Dua, Bali, Senin (20/5/2024).

Sementara itu, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menyerukan agar multipihak dari berbagai belahan dunia segera bertindak nyata sesuai komitmen Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan (SDGs). Jatuh tempo tahun 2030, berdasarkan laporan UNESCO terkini, masih ada 3,5 juta manusia yang mengalami krisis air dan sanitasi.

Seruan itu disampaikan oleh Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon dalam pembukaan agenda pertemuan parlemen pada Forum Air Dunia ke-10 Tahun 2024 di Nusa Dua, Bali, Senin (20/5). Ia menegaskan isu air harus jadi agenda politik dunia.

"Isu air harus jadi isu politik yang membutuhkan niat dan aksi politik nyata untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak air dan sanitasi yang menjadi hak asasi manusia. (Hak) ini adalah sesuatu yang esensial untuk memperoleh kehidupan yang layak, persis seperti yang diadopsi oleh PBB," tegas Fadli

di hadapan 49 negara yang diwakili oleh para delegasi.

Parlemen dari berbagai belahan dunia, sebutnya, adalah representasi dari masyarakat di konstituennya. Maka, parlemen tidak bisa memilih untuk diam saja. Partisipasi aktif masyarakat dan komunitas lokal harus diakui oleh negara. Sebab, baginya, mereka adalah salah satu pelopor yang mampu menghasilkan solusi air yang berkelanjutan melalui kearifan lokal yang mereka miliki sejak ratusan lalu.

Indonesia sendiri, terang Fadli, telah mengimplementasikan praktik kearifan lokal konservasi air dengan memberdayakan bambu. Ia menjelaskan bambu bisa dinilai mampu melindungi aliran air tanah dan menjadi sumber hidup bagi generasi masa depan. "Air adalah kekuatan hidup kita. Seluruh praktik yang berasal dari kearifan lokal ini berdampak positif yang perlu kita amplifikasikan dan dipadukan dengan pekerjaan kita sebagai parlemen," pungkasnya. **bia/mh**



**DAERAH PEMILIHAN
(DAPIL)**



Bob Andika Mamana Sitepu Realisasikan Rumah Susun di Karo

Anggota DPR RI Bob Andika Mamana Sitepu bersama Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah susun, Yayasan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas GBKP Alpha Omega di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Beberapa waktu lalu.



"Bahwa mengamati kondisi saat lembaga pendidikan seperti kampus maupun seperti Yayasan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas GBKP Alpha Omega ini, membutuhkan dukungan pembangunan tempat tinggal yang layak untuk pengembangan pendidikan," ujarnya

Oleh karena itu, ungkap politisi Fraksi PDI Perjuangan ini, selaku Anggota Komisi V DPR RI mendorong pembangunan rumah susun tersebut bersumber dari Kementerian PUPR bisa segera terealisasi. Dijelaskan legislator Dapil Sumatera Utara III tersebut, dampak pembangunan ini sangat baik. Selain bisa membantu meringankan beban para peserta didik, pihak pengelola lembaga dapat lebih mengontrol aktivitas belajar Penyandang Disabilitas.

Merespon hal itu tersebut, Bupati Cory Sebayang menyampaikan apresiasi atas terealisasinya pembangunan rumah susun yang didorong melalui aspirasi Anggota DPR RI Bob Andika Mamana Sitepu. Bupati Cory Sebayang itu berharap fasilitas rumah susun tersebut dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan dirawat dengan baik. **pun/mh**

Pembangunan rumah susun tersebut bersumber dari Kementerian PUPR bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan

Sumatera II yang didorong melalui aspirasi Anggota DPR RI Bob Andika Mamana Sitepu. Dalam keterangan resminya, Bob menyebutkan, bantuan rusun itu salah satu program dari Kementerian PUPR.



FOTO: IST/VEL

Anggota DPR RI Hasnuryadi Sulaiman, saat menggelar Bimbingan Teknik (Bimtek) bekerja sama dengan Kemenparekraf RI di Banjarmasin.

Hasnuryadi Sulaiman Dukung Peningkatan Pariwisata Banjarmasin

Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Hasnuryadi Sulaiman bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Kemenparekraf RI) menggelar Bimbingan Teknik (Bimtek) dengan tema “Strategi Komunikasi Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Melalui Penguat Konten dan Fotografi”.

Hal ini untuk mendukung dan membantu peningkatan perekonomian dan pariwisata di Kalimantan Selatan. Bimtek yang digelar di

salah satu hotel di Banjarmasin pada Jumat (10/5/2024) lalu itu, juga dihadiri I Gede Budiwijaya, Ketua Tim Komunikasi Multimedia – Kemenparekraf dan Kepala Dinas Pariwisata Kalsel.

“Kami dari komisi X dan Kemenparekraf RI bersama-sama mengangkat tema strategi komunikasi, khususnya dalam bidang fotografi dan konten-konten video,” ujar anggota Komisi X itu. Kegiatan Bimtek tersebut diharapkan akan terus dilaksanakan di lain waktu, sehingga akan menimbulkan manfaat yang baik untuk pariwisata di Indonesia, khususnya Kalsel.

Terlebih di zaman teknologi ini, setiap orang pasti menggunakan handphone dalam kehidupan sehari-hari, sehingga seluruh foto, video, hingga konten-konten yang tersebar di media sosial sangat cepat menjadi viral.

“Kita tahu, hampir semua orang punya gadget dan di situ ada sosial media. Melalui konten-konten itu bisa kita perkuat untuk strategi pemasarannya, dan mudah-mudahan melalui generasi muda kreatif Kalsel ini bisa membantu untuk memberikan hal positif untuk Banua,” ucapnya.

 gal/mh

Hendrik Lewerissa Beri Ambulans untuk Warga Seith

Anggota Komisi VI DPR RI Hendrik Lewerissa bersama Kepala BRI Cabang Ambon, Muhammad Zakaria menyerahkan satu unit mobil ambulance kepada Yayasan Penggerak Maluku Manise.

Dalam keterangannya, Hendrik menjelaskan bahwa bantuan mobil ambulans merupakan salah satu dari banyak aspirasi yang diwujudkan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Tahun 2024.

Legislator Dapil Maluku ini berharap, mobil ambulans bisa membantu pasien dan masyarakat yang membutuhkan perawatan medis yang jauh dari tempat tinggalnya.

Menurut Hendrik, daerah yang jauh dari rumah sakit seperti Negeri Seith membutuhkan ambulans agar

evakuasi pasien bisa lebih cepat. "Diharapkan mobil ambulans ini dapat memenuhi kebutuhan transportasi bagi pasien yang membutuhkan perawatan medis dari Negeri Seith dan sekitarnya," jelas politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Penyerahan mobil ambulans ini bukan sekadar aksi sosial, tetapi juga merupakan realisasi janji yang pernah disampaikan Hendrik kepada masyarakat Seith saat kampanye pemilu beberapa waktu yang lalu. Ini merupakan komitmen yang kuat terhadap pelayanan kesehatan masyarakat, terutama di daerah terpencil seperti Negeri Seith. Kehadiran mobil ambulans diharapkan mempercepat proses evakuasi dan memberikan akses yang lebih mudah bagi warga yang membutuhkan pertolongan medis mendesak.  we/mh



FOTO: IST/VEL

Anggota Komisi VI DPR RI Hendrik Lewerissa, saat menyerahkan bantuan satu unit ambulans kepada Yayasan Penggerak Maluku Manise.

Rachmat Gobel

Gorontalo Punya Potensi Besar di Bidang Pangan dan Pertanian



FOTO: IST/VEL

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, usai menanam bibit jagung di Gorontalo.

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengungkapkan, persoalan pertanian dan pangan tak bisa jika hanya dikerjakan oleh satu kementerian saja, melainkan harus bersama-sama dengan pemerintah daerah. Dia menyampaikan, Gorontalo punya potensi besar di bidang pertanian dan pangan. Saat ini politisi dari Fraksi Partai NasDem ini sedang memprioritaskan perhatiannya di bidang pertanian dan pangan

“**A**nggaran harus kita pro kepada pertanian. Sekarang kalau dilihat, berapa persen anggaran untuk mendorong pertanian itu sendiri? Saya melihat, evaluasi saya adalah, terlampau mengharapkan banyak dari kementerian,” kata Gobel awal Mei 2024 lalu.

Ia mengaku sudah mencoba membuat pilot project di Gorontalo. Di proyek itu, ia mencoba membuka dua lahan jagung, dua lahan beras, satu

lahan singkong, dan satu lahan untuk kakao atau coklat yang ia tanam tanpa menggunakan pupuk subsidi.

“Jagung sama beras yang tadinya tiga-empat ton, bahkan ada yang lima ton juga itu, ternyata bisa naik dua kali lipat. Dua kali lipat itu baik jagung maupun beras, dan hasilnya setelah dihitung nilai tambah petani itu lebih tinggi, dan itu tanpa menggunakan pupuk subsidi,” jelasnya.

Ia lalu memberikan contoh, satu batang singkong bisa menghasilkan 25-30 kilogram singkong. Dalam satu hektar, ada 10 ribu batang pohon,

yang artinya akan ada setidaknya 250 ribu kilogram singkong siap jual. “Itu kalau dijual Rp 1.000, kan sudah Rp 250 juta. Itu potong ongkos biaya ya setahun. Tapi tetap nilainya lebih tinggi daripada tanam padi dan jagung,” tuturnya.

Dengan rencana-rencana itu, Gobel tak menampik jika ia tengah mempertimbangkan opsi untuk maju di Pilkada 2024 sebagai cabug Gorontalo. Meski tak mau sesumbar, ia menyebut ada banyak masyarakat yang memintanya menjadi gubernur.

— ssb/mh

Maman Imanul Haq Beri Inspirasi Lewat Kabar Manusia

Anggota DPR RI Maman Imanul Haq meluncurkan platform media sosial bertajuk “Kabar Manusia” atau KM pada Rabu (24/4) di Cafe MCC Jatiwangi, Majalengka. Sebagai pencetus sekaligus CEO dari platform tersebut Maman mengatakan, KM akan menyajikan beragam informasi menarik tentang sisi lain manusia yang unik dan rumit.

“**K**abar Manusia akan memenuhi timeline di semua media sosial dengan konten-konten humanis dan inspiratif, tentang pengalaman, doa, atau teladan dari sudut pandang yang berbeda,” kata legislator Dapil Jawa Barat XI itu.

Maman menambahkan, proyek digitalnya itu dibuat sebagai penyampaian pesan agar manusia memiliki kesadaran bahwa dirinya punya kekuatan dan keterbatasan. Selain di instagram, KM juga hadir di berbagai platform media sosial seperti tiktok, facebook, twitter, dan youtube.

Dalam acara tersebut hadir berbagai kalangan dari tokoh masyarakat, mahasiswa, sampai influencer dari Majalengka maupun Jawa Barat. Kelak, KM juga akan berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait pembuatan konten maupun pendistribusian konten-kontennya.

“Ini niat baik kita agar masyarakat diasup dengan konten-konten positif. Saya bersama tim KM berharap publik mendapatkan edukasi yang menginspirasi individu untuk melewati batas-batas kemampuan dirinya,” tutupnya. 



FOTO: IST/VEL

Anggota DPR RI Maman Imanul Haq, saat meluncurkan platform media sosial bertajuk “Kabar Manusia” atau KM di Majalengka.

Zulfikar Achmad

Ingatkan Generasi Muda Cintai Produk Indonesia

Anggota DPR RI Zulfikar Achmad mengingatkan generasi muda di Bungo, Jambi untuk membantu mengembangkan ekonomi negara dengan mencintai produk-produk lokal dari Indonesia.

“**B**ukan hanya sebagai wujud patriotisme tetapi bentuk bela negara yang ditunjukkan pada hasil kekayaan negara yang dimiliki,” ungkapnya melalui keterangan tertulisnya, awal Mei lalu. Zulfikar menyampaikan isu ini bersamaan dengan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan.

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini juga menekankan pentingnya

peran dan kontribusi generasi muda dalam menentukan Indonesia ke depan. Guna menjaga semangat kemerdekaan dan aktualisasi cinta tanah air, maka pemahaman tentang Empat Pilar Kebangsaan harus terus disosialisasikan.

Peserta muda yang mendominasi acara ini, diimbau bukan hanya mencintai produk dalam negeri tetapi turut memasarkan pada dunia lewat berbagai media sosial yang mudah diakses oleh generasi.

“Kita saat ini telah terang-terangan berkompetisi dan berperang secara masif di media sosial, sehingga patut bagi kita turut memperkenalkan aset, karya, dan produk hasil anak bangsa ke dunia. Sehingga, tidak hanya kita bisa mengimpor barang dari luar yang menguntungkan mereka tetapi kita juga bisa memakai dan memasarkan hingga ke luar sebagai bentuk membantu perekonomian kita agar lebih maju lagi,” tegas Zulfikar. 🐦

hal/mh



FOTO: IST/VEL

Anggota DPR RI Zulfikar Achmad, saat memberikan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan.

Slamet

Dorong Kesejahteraan Nelayan



FOTO: IST/VEL

Anggota DPR RI Slamet, saat mengunjungi Desa Cipeundeuy untuk persiapan Kampung Nelayan Maju.

Dalam supervisi persiapan pelaksanaan program Kampung Nelayan Maju (Kalaju), legislator Dapil Jawa Barat IV Slamet mengunjungi Desa Cipeundeuy, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi.

Kepada Kepala Desa Cipeundeuy, Slamet mengungkapkan bahwa Kalaju merupakan program kerja sama antara Komisi IV dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Tujuan program ini sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

"Inshaallah program luar biasa. Anggarannya juga besar, sehingga bapak kepala desa harus dapat memastikan program Kalaju membawa manfaat maksimal untuk nelayan," katanya.

Kalaju adalah perwujudan sinergi beragam kegiatan kampung nelayan yang tertata, maju, bersih, sehat, dan nyaman, serta mampu meningkatkan kualitas dan produktivitas kehidupan nelayan dan keluarganya (Permen KKP Nomor 34 Tahun 2022).

Implementasi kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, mulai peningkatan hasil perikanan dan pengolahannya, pengelolaan pariwisata, pengembangan koperasi nelayan, termasuk peningkatan konservasi dan lingkungan.

“

Kalaju adalah perwujudan sinergi beragam kegiatan kampung nelayan yang tertata, maju, bersih, sehat, dan nyaman

Slamet.
Anggota Komisi IV DPR RI

Slamet berharap program Kalaju tersebut dapat meningkatkan taraf kesejahteraan para nelayan di Indonesia.  **bia/mh**

Nazaruddin Dek Gam

Soroti Krisis Air di Lhoknga

Anggota DPR RI Dapil Aceh I Nazaruddin Dek Gam meminta pemerintah daerah Kabupaten Aceh Besar mencari solusi permasalahan kekeringan. Area Lhoknga yang merupakan dapilnya, saat ini tengah krisis air bersih yang mengkhawatirkan.



FOTO: IST/VEL

Anggota DPR RI Nazaruddin Dek Gam, saat berbicara mengenai permasalahan kekeringan.

“ ini harus dilakukan segera, mengingat masyarakat Lhoknga dalam kondisi seperti sekarang ini,” tegas

Dek Gam kepada media, Kamis (15/5/2024) silam. Menurutnya, respon cepat dari Sat Brimob Polda Aceh, PDAM Tirta Daroy dan Tirta Mountala Aceh Besar patut diapresiasi karena membantu kebutuhan air bersih kepada masyarakat.

Mengingat, kekeringan yang telah berlangsung dalam beberapa bulan terakhir dirasa sangat mengancam ketersediaan air bersih, pertanian, kehidupan sehari-hari di masyarakat.

Selain itu, politisi Fraksi PAN ini meminta dinas terkait seperti Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLHK) Aceh untuk melakukan pemeriksaan

terkait kekeringan di Kecamatan Lhoknga.

Menurutnya salah satu yang harus dilakukan investigasi adalah di lokasi PT. Solusi Bangun Andalas (PT SBA). “Hal itu penting dilakukan untuk memastikan apakah kekeringan tersebut ada kaitan dengan keberadaan perusahaan semen tersebut. Jika penyebab kekeringan itu terbukti oleh perusahaan PT SBA. Kita meminta Perusahaan tersebut ditutup saja,” tegas Dek Gam.

Kemudian, Yulfan salah satu tokoh pemuda Kecamatan Lhoknga mempertanyakan soal kekeringan di Kecamatan Lhoknga. Sebab sampai saat ini belum ada dinas-dinas terkait yang turun ke lapangan. Penanganan masalah kekeringan ini menurutnya masih belum sistematis, terpadu, menyeluruh, harus segera dilakukan koordinasi dengan semua elemen.

“Harusnya mobil tangki ditambah, perlu diberikan tandon penampungan air ke gampong-gampong, dan penambahan jumlah personil. Keterbatasan tersebut mengakibatkan masyarakat yang didominasi ibu-ibu harus menunggu lama dipanas terik dengan antrian yang panjang,” keluhnya. **aha/mh**



Elly Rachmat Yasin

Dorong Pengembangan Kawasan Olahraga Pakansari

Bersilaturahmi adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh wakil rakyat, tidak sekadar tegur sapa, tetapi juga mendengarkan berbagai aspirasi masyarakat. Hal ini dilakukan oleh Anggota Komisi VI DPR RI, Elly Rachmat Yasin, saat melakukan kunjungan ke daerah pemilihannya di Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu.

Salah satu aspirasi yang diusung masyarakat adalah kebutuhan fasilitas olahraga yang memadai di Bumi Tegar Beriman. "Fasilitas ini sangat penting untuk mengembangkan berbagai cabang olahraga di Kabupaten Bogor. "Saya setuju soal perlunya gymnasium dan kolam aquatic di Pakansari. Apalagi, sudah ada siteplan-nya. Keberadaan gymnasium bisa

digunakan banyak cabang olahraga dan harus bisa menggelar even olahraga berstandar nasional dan internasional," kata Elly.

Elly menegaskan bahwa dirinya akan terus memperjuangkan aspirasi insan olahraga di Kabupaten Bogor yang menginginkan ada gymnasium, kolam aquatic, dan pusat bisnis. "Pakansari Sport Center saat ini sudah menjadi ikon Kabupaten Bogor. Saya berharap ke depan Pakansari harus ada venue-venue

baru seperti gymnasium, kolam aquatic, venue equestrian, venue menembak, lapangan tenis, dan lain-lain," pungkasnya.

Elly menyatakan siap berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mewujudkan pembangunan tersebut. "Saya akan komunikasi dan koordinasi dengan teman-teman di Komisi X terkait keinginan masyarakat Kabupaten Bogor soal gymnasium dan kolam aquatic," tambahnya.  rmm/mh





Ekho Kurniawan

Sahabat Alam Sang Pengelola Lingkungan

Menjaga lingkungan tempat kita hidup sehari-hari merupakan tanggung jawab bersama yang harus diemban. Jika lingkungan rusak maka para penghuninya pun harus menanggung dampak, perilaku masyarakat menentukan kualitas lingkungan.

Kesadaran menjaga lingkungan harus tertanam pada setiap penghuninya. Ekho Kurniawan merupakan sosok yang punya kepedulian terhadap lingkungan. Lebih dari itu, dia merupakan founder dan pembina Bank Sampah Sahabat Alam (BSSA). BSSA merupakan gerakan yang mengajak dan mengedukasi masyarakat agar bijak dalam mengelola sampah.

Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menjadi polusi yang merusak lingkungan. Tanpa pengelolaan yang baik, sampah dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Coba hitung berapa banyak sampah yang kita hasilkan dalam 1 hari, bila jumlah tersebut dikalikan dengan jumlah seluruh penduduk bumi, bayangkan berapa banyak sampah yang akan menggunung.

Maka di setiap lingkungan masyarakat, kita membutuhkan banyak orang yang punya kesadaran menjaga dan merawat lingkungan dengan baik seperti Ekho Kurniawan. Melalui saran BSSA, dia bersama orang-orang yang terlibat di dalamnya menjalankan program pengelolaan sampah yang patut diapresiasi. BSSA mempunyai beberapa program dan kegiatan, mulai dari 4 program unggulan, yaitu Sedekah Hijau, Sampah Emas, Sedekah Jelantah, dan Sampah Dapur Jadi Sayur.

"Untuk Program Sedekah Hijau nantinya masyarakat dapat memilah dan mengumpulkan sampah anorganik yang bernilai, untuk disedekahkan dalam bentuk uang dan makanan. Program Sampah Emas adalah masyarakat menabung sampah anorganik yang sudah dipilah dan bernilai jual, untuk ditukarkan dengan emas sesuai dengan jumlah sampah yang disetorkan," jelas Ekho saat

“

Masalah yang menjadi momok di setiap daerah dan negara di seluruh dunia adalah sampah. Tetapi di negara yang sudah maju, mereka sudah memanfaatkan sampah ini menjadi berguna dan bermanfaat

FOTO: IST

Ekho Kurniawan, founder dan pembina Bank Sampah Sahabat Alam (BSSA).



diwawancarai Parleментарia awal April 2022.

Program Sedekah Jelantah adalah masyarakat mengumpulkan minyak jelantah yang tidak dipakai lagi, dan diserahkan ke BSSA untuk dikelola dan diserahkan kepada pihak pengepul yang akan diolah menjadi biodiesel. Dan Program Sampah Dapur Jadi Sayur sesuai dengan judulnya masyarakat dapat menukarkan sampah organik yang berasal dari rumah tangga atau industri untuk ditukarkan dengan sayuran baru.

Bahkan, Ekho berencana membuat program pengelolaan sampah yang bisa menjadi beasiswa sarjana. "Saya berpikir ada program sarjana dari sampah. Dari sampah orang bisa jadi sarjana, atau bisa disebut beasiswa sampah." Menurutnya, program ini masih dalam tahap rencana, akan dikonsultasikan dengan beberapa pihak lagi.

BSSA menjalankan programnya di Desa Kampung Apar, Kecamatan Pariaman Selatan, Sumatera Barat. Fonder BSSA merupakan Lulusan S1 Teknik Lingkungan Universitas Andalas (Unand) Padang, dan

telah menempuh studi S2 Teknik Lingkungan di Kampus yang sama. Dia sangat konsen mengatasi masalah lingkungan, apalagi yang berkaitan dengan sampah.

"Sejak remaja memang saya sangat tertarik dengan isu lingkungan, dimana masalah yang menjadi momok di setiap daerah dan negara di seluruh dunia adalah sampah. Tetapi di negara yang sudah maju, mereka sudah memanfaatkan sampah ini menjadi berguna dan bermanfaat," ungkap Ekho.

Ada lima aspek pengelolaan sampah, yaitu: aspek kelembagaan, aspek pembiayaan, aspek peraturan, aspek peran serta masyarakat atau sosial, dan aspek teknis operasional. Dari lima aspek ini, menurut Ekho, aspek sosial adalah yang tidak mudah. "Dari lima aspek pengelolaan sampah yang paling susah adalah aspek sosial. Aspek teknis, hukum, lembaga, dan teknologi relatif tidak susah. Kalau aspek sosial sudah beres yang lain akan mudah menurut saya," paparnya.

eko/mh



oleh:

Bambang TS, Rahayu YS, Erika PW
(Program Doktor Manajemen Bisnis -
Sekolah Bisnis IPB)

Tingginya permintaan akan kenyamanan dalam konsumsi makanan telah mendorong terobosan inovatif dalam industri makanan, khususnya dalam teknologi kemasan.

Di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap keamanan makanan dan dampak lingkungan dari limbah kemasan, *smart packaging* (kemasan pintar) muncul sebagai solusi transformatif yang sejalan dengan harapan konsumen modern akan kualitas dan kenyamanan.

Smart packaging merupakan evolusi besar dari metode kemasan makanan tradisional, memadukan interaksi aktif dengan produk makanan guna memperpanjang umur simpannya dan sistem cerdas

Teknologi *Smart Packaging*: Solusi Rasa Aman pada Makanan Siap Saji



yang memberikan informasi kepada konsumen tentang kesegaran dan keamanan makanan.

Teknologi *Smart Packaging*

Smart packaging, yang meliputi komponen *active packaging* (kemasan aktif) dan *intelligent packaging* (kemasan cerdas), sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan ini dengan meningkatkan umur simpan produk dan menyediakan

informasi waktu nyata tentang kondisi makanan. *Active packaging* bekerja dengan secara aktif mengubah lingkungan sekitar makanan, seperti menyerap oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, atau melepaskan agen antimikroba, sehingga secara signifikan dapat memperpanjang umur simpan makanan siap saji.

Sementara itu, *intelligent packaging* melibatkan penggunaan sensor dan indikator yang memberikan data tentang makanan



DPR RI dan Sorotan terhadap Kemasan Pangan



Ketua DPR RI Puan Maharani, dalam kunjungan industri kecil di Klaten, menekankan pentingnya diversifikasi kemasan untuk memberikan konsumen lebih banyak pilihan yang berdampak pada peningkatan keamanan produk pangan. Ini merupakan bagian dari upaya DPR RI untuk memastikan bahwa industri makanan memperhatikan aspek kesehatan dan keamanan melalui inovasi kemasan (antaranews.com).

Puan Maharani,
Ketua DPR RI



Nur Yasin, anggota Komisi IX dari Fraksi PKB di DPR RI, menekankan perlunya kebijakan kemasan pangan yang lebih komprehensif untuk memastikan kesehatan masyarakat. Yasin menambahkan bahwa kebijakan kemasan harus dibahas lebih komprehensif, mencontoh praktek terbaik dari negara lain, dan melibatkan diskusi yang lebih dalam. Hal ini bertujuan untuk menciptakan regulasi yang seimbang yang melindungi kesehatan publik tanpa mengabaikan dampak lingkungan dari solusi yang dipilih (GoRiau.com).

Nur Yasin,
Anggota Komisi IX DPR RI



dalam kemasan, seperti perubahan suhu atau paparan kontaminan, yang sangat penting untuk memastikan keamanan makanan secara real-time. Salah satu teknologi penting dalam *intelligent packaging* adalah penggunaan RFID (*Radio Frequency Identification*). Teknologi RFID memungkinkan pelacakan produk yang lebih efisien dalam rantai pasokan, meningkatkan manajemen inventaris, dan memastikan keaslian produk. Dengan teknologi ini informasi penting tentang produk

dapat diakses secara *real-time*, memberikan tingkat transparansi yang lebih tinggi dan membantu dalam penjaminan kualitas serta keamanan makanan, terutama makanan siap saji.

Smart Packaging, Inovasi yang Menjawab Tantangan

Smart packaging, atau kemasan pintar, merupakan inovasi yang tidak hanya menjawab tantangan keamanan dan kesegaran produk

pangan, tetapi juga membantu dalam pengurangan limbah. Teknologi seperti RFID (*Radio Frequency Identification*) yang terintegrasi dalam kemasan memungkinkan pelacakan produk yang lebih efisien secara real-time, manajemen inventaris yang lebih baik, dan transparansi yang lebih tinggi dalam rantai pasokan.

Prospek Masa Depan: Peluang dan Tantangan

Dengan berkembangnya kesadaran konsumen terhadap keamanan pangan dan keberlanjutan, serta kemajuan teknologi, permintaan akan *smart packaging* diperkirakan akan terus meningkat. Inovasi seperti sensor biodegradable dan sistem kemasan yang dikendalikan oleh AI (*Artificial Intelligence*) berpotensi membawa gelombang pengembangan selanjutnya dalam industri kemasan. Namun, tantangan seperti biaya implementasi dan dampak lingkungan dari material baru tetap menjadi pertimbangan penting dalam adopsi teknologi ini.



Oleh:
dr. Nur Nadya
RS Ibnu Sina Bojonegoro

Mengenal Lebih Dekat Radang Pada Usus Buntu

Radang usus buntu atau dalam bahasa medisnya disebut apendisitis adalah peradangan pada apendiks (umbai cacing/usus buntu).

antibodi (kekebalan tubuh). Siapa pun dapat terkena radang usus buntu, tapi penyakit ini paling sering terjadi pada orang berusia antara 10 dan 30 tahun.

Meskipun demikian, usus buntu juga dapat dialami oleh anak-anak

dan remaja. Tanpa penanganan yang tepat, penyakit usus buntu dapat menjadi serius dan menyebabkan usus buntu pecah. Kondisi tersebut dapat menimbulkan nyeri hebat yang dapat berdampak fatal.

Radang usus buntu terbagi menjadi 2 tipe yaitu, radang usus buntu akut dan radang usus buntu kronis. Radang usus buntu terjadi ketika usus buntu tersumbat oleh kotoran (feses), benda asing, kanker, atau pun oleh pembengkakan usus buntu akibat infeksi.

Pada dasarnya semua orang memiliki organ yang bernama usus buntu. Organ ini berbentuk seperti kantung kecil dan sangat tipis berukuran 5 sampai 10 cm yang berfungsi sebagai penghubung menuju usus besar. Di mana letak usus buntu? Usus ini besarnya kira-kira sejadi kelingking dan terhubung pada usus besar yang letaknya berada di perut bagian kanan bawah.

Pada awalnya organ ini dianggap sebagai organ tambahan yang tidak mempunyai fungsi, tetapi saat ini diketahui bahwa fungsi apendiks adalah sebagai organ imunologik dan secara aktif berperan dalam sekresi



Penyebab Penyakit Usus Buntu

Penyakit usus buntu terjadi akibat infeksi di rongga usus buntu. Akibatnya, bakteri berkembang dengan cepat sehingga membuat usus buntu meradang, bengkak, dan bernanah. Penyebab penyakit usus buntu belum dapat dipastikan. Namun, ada sejumlah faktor yang diduga dapat menyebabkan seseorang mengalami radang usus buntu, yaitu :

1. Hambatan di pintu rongga usus buntu akibat penumpukan feses atau tinja yang mengeras.
2. Penebalan atau pembengkakan jaringan dinding usus buntu karena infeksi di saluran pencernaan atau bagian tubuh lainnya.
3. Penyumbatan rongga usus buntu akibat pertumbuhan parasit di pencernaan, misalnya infeksi cacing kremi atau ascariasis.
4. Kondisi medis tertentu, seperti tumor pada perut atau inflammatory bowel disease.
5. Cedera di perut.

Gejala Penyakit Usus Buntu

Gejala utama penyakit usus buntu adalah nyeri di perut yang disebut kolik abdomen. Nyeri tersebut dapat berawal dari pusar, kemudian bergerak ke bagian kanan bawah perut. Lokasi nyerinya bisa berbeda-beda, tergantung pada usia pasien dan posisi usus buntu itu sendiri.

Dalam waktu beberapa jam, nyeri akibat penyakit usus buntu bisa bertambah parah, terutama saat bergerak, menarik napas dalam, batuk, atau bersin. Selain itu, nyeri juga bisa muncul secara mendadak, bahkan saat penderita sedang tidur.

Gejala nyeri perut tersebut dapat disertai gejala lain, di antaranya :

1. Perut kembung
2. Mual dan muntah
3. Demam dan menggigil
4. Hilang nafsu makan
5. Tidak bisa buang gas atau kentut
6. embelit (konstipasi)
7. Diare

Jika nyeri sudah tidak tertahankan segeralah meminta pertolongan pada rumah sakit karena radang usus buntu merupakan penyakit yang membutuhkan pertolongan medis yang segera.



Pencegahan Radang Pada Usus Buntu

Usus buntu kerap disebut sebagai penyakit yang muncul karena gaya hidup yang sembarangan saat mengonsumsi makanan. Terkadang karena begitu nikmatnya suatu makanan, seseorang bisa melupakan dampak kesehatan yang akan terjadi. Padahal, kenikmatan yang dirasakan oleh lidah belum tentu memberikan manfaat untuk organ pencernaan di dalam tubuh.



Beberapa hal di bawah ini mungkin dianggap sepele namun dapat mencegah usus buntu :

1. Jangan sering menahan kentut dan BAB
2. Perbanyak minum air putih
3. Kurangi makanan cepat saji, pedas dan berbiji
4. Konsumsi makanan yang berserat tinggi
5. Olahraga Rutin





Kisah Gedung Pos Tua di Tangan Anak Muda

Gedung berusia lebih dari satu abad itu masih berdiri kokoh dengan bagian eksteriornya terlihat baru dicat. Sentuhan para anak muda kreatif, seolah membuat Gedung Filateli kembali bergairah. Di tahun 2021, gedung tua ini lahir kembali dengan bendera 'Pos Bloc Jakarta'.



Dibangun pada zaman pendudukan Belanda, Gedung Post en Telegraf masih mampu menyihir siapapun yang menyambungnya. Sentuhan gaya art deco yang kental, kini tengah berpadu dengan kios-kios estetik milik anak muda yang menjajikan hasil kreativitas mereka.

Masuklah dari pintu utama yang terletak di Jalan Pos, tak jauh dari kawasan pasar baru dan tepat di muka kali ciliwung. Fasad melengkung berhias kaca patri dan pilar-pilar besar seolah siap menyambut siapa saja yang hadir. Pastikan Sobat Parlemen

mengabadikan kunjungan ke tempat ini.

Melangkah masuk, sobat akan bertemu ruang besar dan lapang menyerupai aula. Terdapat tangga menyerupai tribun, cocok untuk sekadar bersantai bersama kawan. Di bagian paling atas terdapat rak buku, Sobat parlemen bisa membaca buku-buku di sana secara gratis bahkan juga bisa bertukar buku dengan koleksi yang ada di sana.

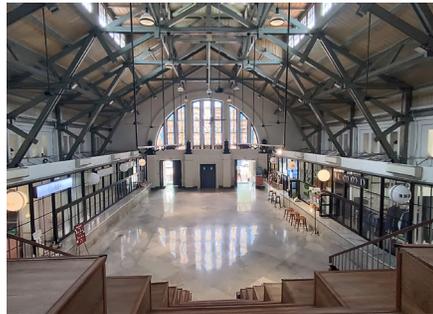
Di belakang tangga tersebut terdapat sebuah layar besar, bagian ruangan ini kerap digunakan untuk berbagai ara, mulai dari pertunjukan musik hingga nonton bareng. Saat sedang tak ada acara khusus,

tersedia kursi dan meja yang bisa mendukung kegiatan "work from anywhere".

Tak lengkap rasanya bertandang ke Pos Bloc Jakarta tanpa mampir ke berbagai kios yang ada. Para penyuka kopi bisa bersantai dan menyeruput segelas es kopi dingin di Canggung Bakehouse atau Filosofi Kopi. Tak hanya aneka minuman, dua kedai kopi modern ini juga menyuguhkan berbagai menu roti dan pastry.

Cita rasa Indonesia juga hadir di tempat ini, salah satunya adalah Tauto Kedung Rasa. Soto dengan Tauco yang menjadi khasanah kuliner Pekalongan ini tentu bukan makanan yang bisa ditemukan dengan mudah di kota metropolitan.

Jika ingin rasa yang lebih familiar, mungkin 'Sedjuk bakmi & Kopi' bisa menjadi pilihan. Kedai Bakmi ini sempat viral dan digandrungi para anak muda. Tak hanya menu bakmi dengan aneka topping, disini juga ada



kudapan hingga olahan lauk yang cocok disantap dengan nasi hangat.

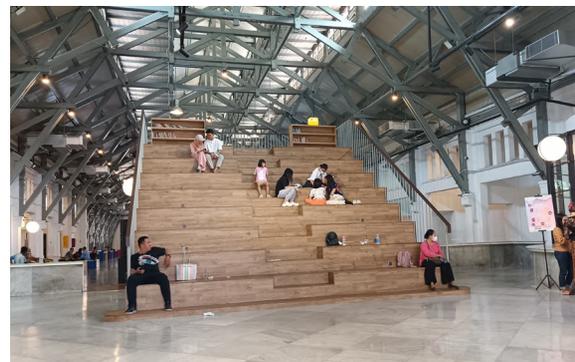
Untuk Sobat Parlemen yang ingin bertualang rasa, singgah lah di salah satu kedai yang menawarkan menu-menu internasional seperti Masti Jakarta atau Na Masti dengan cita rasa Indianya, ada pula potongan pizza ala New York yang berukuran besar di Pizza Head dan aneka pilihan masakan Jepang-fusion di Gyu Jin Teppan.

Kreativitas anak muda di tempat ini juga menghadirkan berbagai produk lawas dengan gaya kekinian, contohnya berbagai ramuan dari kedai Jamuné. Aneka rempah dan herbal yang biasa disajikan sebagai jamu kini dikemas apik hingga terlihat

lebih menarik dengan label nama yang unik. Sebotol 'Purple Magic' berisi bunga telang, sereh, jeruk nipis dan jahe dipercaya bisa membantu meredakan gejala batuk. Menu yang ada di sini juga cocok diminum untuk menggantikan minuman ringan kemasan.

Tak hanya makanan dan minuman hadir pula berbagai jenama yang lahir dari tangan-tangan muda Indonesia. Raddyn Indonesia menawarkan aneka produk perawatan tubuh asal madura yang tak hanya mencuri perhatian kaum hawa. Ada pula Sovlo, aneka souvenir Lokal yang terinspirasi dari kekayaan budaya lokal Indonesia.

Di lobi timur, masih terdapat sebuah kantor pos kecil untuk Sobat



Suasana serupa di Pos Bloc Jakarta juga bisa didapatkan di:

- Pos Bloc Surabaya
- Pos Bloc Medan
- Mbloc Jakarta
- Lokananta Bloc Surakarta
- JNM Bloc Yogyakarta
- Fabriek Bloc Padang

Parlemen yang ingin bernostalgia. Ajak teman-teman yang datang untuk saling berkirim kartu pos, tak ada salahnya juga mengalamatkan sepucuk surat pada diri sendiri.

Pos Bloc beroperasi setiap hari dari senin hingga minggu mulai pukul 10.00 - 20.00, pada jumat-minggu Pos Bloc buka lebih awal sejak pukul 07.00. Terkadang di akhir pekan digelar berbagai acara seru di tempat ini. Sobat Parlemen bisa memantau jadwal terkini melalui akun media sosial resmi dari Pos Bloc. [uc/mh](#)

FADLI ZON

*Prangko
Penanda
Zaman*

“Hobi mengoleksi prangko atau filateli itu rajanya hobi, dan hobinya para raja, mulai dari Ratu Elizabeth, Winston Chrucill, sampai Roosevelt, punya hobi filateli, sehingga tak lekang oleh waktu. Bahkan, peminatnya terus bertambah setiap tahunnya.”

tulah yang diungkap Anggota DPR RI Fadli Zon yang punya hobi berburu perangko unik dari berbagai negara. Hobi filateli sudah digeluti sedari kecil. Kini, ia diangkat menjadi Ketua Umum Perhimpunan Filatelis Indonesia (PFI) Periode 2022-2027.

Menurut politisi Fraksi Partai Gerindra ini, filateli merupakan hobi tertua di Indonesia. Para filatelis berkegiatan mengoleksi prangko dan benda-benda filateli lain, meraih prestasi, dan memahami arti benda-benda yang dikoleksi.

Ada 12 kelas kategori minat dalam dunia filateli, yaitu Aerophilately, Astro philately, Postal History, Postal Stationery, Thematic Philately, Traditional Philately, Modern Philately, Literature Philately, One Frame Philately, Open Philately, dan Creative Philately.



Anggota DPR RI Fadli Zon saat meluncurkan buku “Hindia Belanda dalam Kartu Pos Bergambar” dan situs filatelis di Rumah Kreatif Fadli Zon, Cimanggis, Depok.

Baru-baru ini Fadli meluncurkan buku “Hindia Belanda dalam Kartu Pos Bergambar” dan situs filatelis. Acara dihelat secara sederhana di

Rumah Kreatif Fadli Zon, Cimanggis, Depok. Peluncuran dua hal itu bersamaan dengan perayaan Perkumpulan Filatelis Indonesia yang genap berusia 102 tahun pada Jumat (29/3/2024) silam.

Buku Hindia Belanda dalam Kartu Pos Bergambar dibagi menjadi tiga jilid. Jilid pertama, Panorama Pulau Jawa, yang memuat seluruh kartu pos dari ekshibit itu terkait pemandangan alam dan bangunan Hindia Belanda di Pulau Jawa.

Jilid kedua, Panorama Di Luar Jawa, yang menyajikan kartupos yang menampilkan pemandangan alam dan bangunan Hindia di Luar Jawa, dan Jilid ketiga, Panorama Budaya Nusantara, yang menyajikan sejumlah kartupos yang memuat aneka seni dan peninggalan budaya dari berbagai wilayah Nusantara.

“Penerbitan buku ini merupakan bagian dari komitmen PFI yang didukung penuh oleh Fadli Zon Library dalam mendorong terus tumbuh dan berkembangnya filateli

sebagai kegiatan bermanfaat bagi pembentukan karakter bangsa,” ujar Fadli dalam keterangan tertulisnya.

rmm/mh



FOTO: RUNI/VEL

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi saat memimpin RDPU Komisi X DPR RI dengan Aliansi BEM SI di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5/2024).

Hidup Mahasiswa!

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mengkritisi kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI dengan Aliansi BEM Seluruh Indonesia, pertengahan Mei lalu. Ia merasa aneh atas kenaikan UKT yang mendadak



“M enurut kami bahwa kenaikan yang mendadak ini tidak manusiawi. Kalau kenaikannya 10, 20 persen sangat mungkin bisa

ditolerir. Tapi kalau kenaikannya 300 persen sampai 500 persen sepertinya ada yang aneh,” ujar Dede.

18 orang perwakilan dari Aliansi BEM SI yang berasal dari sejumlah universitas datang mengadu ke ruang Komisi X DoR.

Komisi X DPR RI merespon kenaikan biaya UKT ini dengan membentuk Panja dan mendesak agar Permendikbud dicabut dan direvisi. Menutup pertemuan, Dede pun langsung berteriak, “Hidup mahasiswa!” **hal/mh**



SEGENAP PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR RI
SERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

MENGUCAPKAN

Selamat Hari Pendidikan Nasional

2 Mei 2024



DPR RI



DPR RI



@dpr_ri



@dpr_ri



@dpr_ri



@dpr_ri